

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) DI KAMPUS UNIVERISITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT POLICY OF INDEPENDENT  
CAMPUS LEARNING ON THE MAKASSAR MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY CAMPUS**



**TESIS**

**HERIS**

**Nomor Induk Mahasiswa: 105031104420**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) DI KAMPUS UNIVERISITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT POLICY OF INDEPENDENT  
CAMPUS LEARNING ON THE MAKASSAR MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY CAMPUS**



**TESIS**

**HERIS**

**Nomor Induk Mahasiswa: 105031104420**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) DI KAMPUS UNIVERISITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TESIS**

**Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Magister**



**Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**HERIS**

**Nomor Induk Mahasiswa: 105031104420**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) DI KAMPUS UNIVERISITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Yang Disusun dan Diajukan Oleh

**HERIS**

**NIM. 105031104420**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 5 Juli 2024

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si**

  
**Dr. H. Lukman Hakim, M.Si**

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik

  
**Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd**  
**NBM. 483.523**

  
**Dr. Hj. Fatmawati, M.Si**  
**NBM. 107.6424**

## HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa : Heris

NIM : 105031104420

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan panitia penguji tesis pada tanggal 5 Juli 2024 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (M.Ap) pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

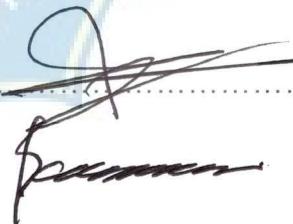
Makassar, 5 Juli 2024

Tim Penguji

Dr. Jaelan Usman, M.Si  
(Ketua)



Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si  
(Sekretaris/Pembimbing I/Penguji)



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si  
(Pembimbing II/Penguji)

.....

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si  
(Penguji)



Dr. Hafiz Elfiansya Pawaru, ST., M.Si  
(Penguji)

.....

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heris

NIM : 105031104420

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya. Bahwa tesis yg saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juli 2024



Heris

## ABSTRAK

**Heris. 2024.** Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Kampus Univerisitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan H. Lukman Hakim.

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa secara maksimal. Kurikulum ini didesain agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa merasa terbebani oleh tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian sebanyak 15 orang terdiri dari Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktvitas Instruksional (LP2AI), Ketua Prodi Agribisnis, ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen, dan Mahasiswa serta mitra Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hadirnya program MBKM sangat efektif karena dari persentase menghasilkan 26% responden menyatakan bahwa dapat mempermudah capaian lulusan, 44% menambahkan skill tambahan, 72% dapat meningkatkan wawasan, 44% bermanfaat untuk bekal lulus, dan 48% penting menghadapi pasca kampus serta 54% sesuai kebutuhan pada masa yang akan datang. Oleh karenaitu program MBKM masih menjadi salah satu program yang harus tetap di pertahankan dan di lanjutkan dalam dunia kampus. Sehingga kesiapan kerja mahasiswa setelah mengikuti MBKM memiliki kemampuan keterampilan yang mumpuni.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Implementasi, Kampus Merdeka.

## ABSTRACT

**Heris. 2024.** Implementation of The Independent Policy of Independentcampus Learning on The Makassar Muhammadiyah University Campus. supervised by Nuryanti Mustari dan H. Lukman Hakim.

*The Independent Learning Curriculum is an innovation in the world of Indonesian education which aims to develop students' learning potential and interest to the maximum. This curriculum is designed so that students can learn according to their interests and talents, without feeling burdened by too high academic demands. The type of research used is qualitative with phenomenological research type. The 15 research informants consisted of the Chair of the Educational and Instructional Activity Development Institute (LP2AI), the Chair of the Agribusiness Study Program, the Chair of the Sharia Economic Law Study Program, lecturers, and students and partners of the Muhammadiyah University of Makassar.*

*The research results show that the presence of the MBKM program is very effective because from the resulting percentage, 26% of respondents stated that it could make graduates' achievements easier, 44% added additional skills, 72% could increase insight, 44% was useful for preparing for graduation, and 48% was important for facing post-college and 54% according to future needs. Therefore, the MBKM program is still one of the programs that must be maintained and continued on campus. So that students' work readiness after participating in MBKM has qualified skills.*

**Keywords:** Policy, Implementation, Independent Campus.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar” tesis ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2) pada jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Pascasarjana Unismuh Makassar. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan sosok sauri teladan bagi seluruh umat dan semoga tercurah untuk kita semua. Aamiin

Ucapan yang tulus, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang senantiasa mendoakan, mendukung serta mengasihi tanpa pamrih sampai saat ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis curahkan kepada istri saya yang senantiasa membantu untuk memudahkan segala urusan yang saya hadapi selama ini. Di balik perjalanan untuk menyelesaikan studi S.2, ada banyak sekali pengalaman, kenangan serta cerita yang di ukir oleh penulis di Kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar yang tentunya menjadi pembentuk diri bagi penulis untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan dimanapun berada.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, M.T., I.P,U selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh Informan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Administrasi Publik khususnya kelas MIAP angkatan 16, 2020 dan Istri tercinta saya yang senantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian studi penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat kepada para pembaca guna menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai sumber informasi bagi Universitas Muhammadiyah Makassar dalam implementasi kebijakan program MBKM.

Makassar, 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Heris

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Teori dan Konsep .....	10
C. Konsep Program MBKM.....	31
D. Implementasi Kebijakan MBKM .....	33
E. Kerangka Pikir.....	43
F. Deskripsi Fokus.....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Tipe Penelitian .....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Informan Penelitian .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Teknik Analisis Data .....	52
G. Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian .....	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>188</b>

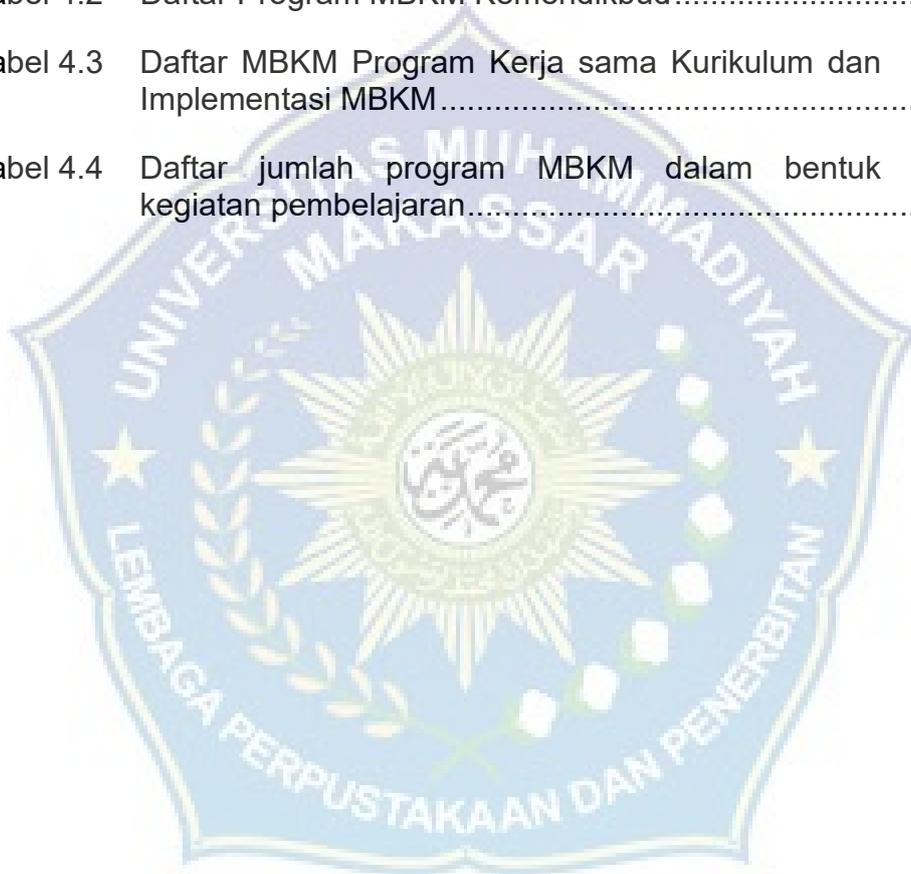
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn.....	26
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan menurut Warwic.....	28
Gambar 2.3	Kerangka Pikir .....	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Unismuh Makassar .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan .....	22
Tabel 3.1	Daftar informan Penelitian .....	50
Tabel 4.1	Daftar Kriteria Kegiatan di luar Kampus.....	64
Tabel 4.2	Daftar Program MBKM Kemendikbud.....	87
Tabel 4.3	Daftar MBKM Program Kerja sama Kurikulum dan Implementasi MBKM.....	88
Tabel 4.4	Daftar jumlah program MBKM dalam bentuk kegiatan pembelajaran.....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian .....	145
Lampiran 2	Hasil Plagiasi .....	147
Lampiran 3	Hasil Turnitin.....	148
Lampiran 4	Instrumen Wawancara.....	159
Lampiran 5	Matriks Wawancara.....	169



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya persaingan dan informasi yang pesat pada semua sektor tanpa terkecuali di bidang pendidikan yang mengharuskan memiliki daya saing yang kuat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dibarengi dengan memiliki *soft skills* yang bagus. Inovasi pendidikan harus didesain untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap dan mampu menghadapi era revolusi industri 4.0 (Siswati, 2019). Dengan begitu, Wardani (2022) mengemukakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi era tersebut adalah merupakan berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi, dan bekerjasama serta percaya diri.

Oleh karena itu, para Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu menata dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga mahasiswa dapat memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal dan optimal, meliputi aspek sikap, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang senantiasa relevan. Namun Kemnaker merilis pada Februari 2023, mencatat angka 12% pengangguran di Indonesia yang didominasi lulusan Sarjana dan Diploma. Menurutnya, besar jumlah pengangguran dari lulusan Perguruan Tinggi ini disebabkan tidak adanya *link and match* antara Perguruan Tinggi dengan pasar

kerja serta karena adanya ketidaksesuaian *skill* yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja, yang tentunya menjadi penanda bahwa pendidikan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang siap bekerja berdasarkan tuntutan zaman.

Lembaga pendidikan di Indonesia pun terus melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu jalan bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk dapat menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, berkarakter serta memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memperoleh ilmu yang berguna dalam menghadapi dunia kerja, serta memberikan dukungan bagi mahasiswa dan dosen dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas dan bermakna dalam era disrupsi saat ini. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dianggap dapat membekali mahasiswa dengan pengalaman baru dan memperluas cakrawala pengetahuan dan pengalaman mereka (Istiana et al., 2021). Dengan demikian, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dilapangan

yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan cara utuh, siap bekerja, atau menghasilkan serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya karena program MBKM terbilang masih sangat baru sejak diluncurkan pada tahun 2020.

Permasalahan umum dalam penerapan MBKM di Perguruan Tinggi adalah penyesuaian kurikulum Perguruan Tinggi dan kurikulum MBKM. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi adalah sistem konversi SKS yang masih menimbulkan tanda tanya dan keluhan dari berbagai pihak pelaksana di Perguruan Tinggi. Sistem konversi 20 SKS yang dikonversi ke mata kuliah yang diikuti di Kampus sesungguhnya hanya mengukur beban dan bukan kompetensi riil mahasiswa terlebih lagi terdapat mata kuliah wajib yang harus diikuti, apabila kompetensi tidak sesuai dengan capaian belajar di program studi maka tentunya tidak dapat dikonversi atau disetarakan dengan mata kuliah wajib.

Kunci keberhasilan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bergantung pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang dimana pihak Perguruan Tinggi harus mampu menyesuaikan dengan kurikulum secara adaptif, *fleksible* serta dapat berkolaborasi dengan pihak mitra terkait dengan bidang keilmuan yang ditawarkan, dikemukakan oleh Puspitasari dan Nugroho (2021).

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang turut aktif mendukung program-program MBKM serta menyambut baik program ini. Sepanjang Tahun 2021 sampai 2023 Kampus Unismuh Makassar telah menerima program MBKM dari Kemendikbud. Dalam penerapan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar sendiri masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian MBKM tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai sebuah bentuk evaluasi setelah berjalannya beberapa tahun program MBKM ini, dirasa perlu untuk melihat dampak implementasi program pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar.

(Maulana et al., 2022) mengemukakan bahwa kebijakan dalam pembangunan Pendidikan Tinggi, melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus bertumpu pada prinsip-prinsip keberhasilan serta tujuan yang jelas. Kebijakan merupakan alat teknis, rasional, dan berorientasi aksi untuk mengatasi masalah. Kebijakan merupakan petunjuk arah bagi tindakan yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan direncanakan dan disusun secara sengaja untuk membentuk perilaku masyarakat yang dituju (kelompok sasaran) sesuai dengan isi dan rumusan dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan diciptakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, setelah kebijakan dibuat, tugas berikutnya adalah mengatur pelaksanaan atau melakukan implementasi dari kebijakan tersebut.

Terdapat 4 (empat) kebijakan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dipelopori oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 yang terdiri dari 1 kebijakan yang lainnya terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu khususnya otonomi pengelolaan yang berbadan Hukum. Sedangkan 3 kebijakan terkait Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dimana PTS dituntut untuk menyesuaikan dan bahkan harus melakukan improvisasi terhadap kebijakan baru, seperti: sistem akreditasi PT, hak belajar 3 semester di luar Program studi (Prodi), serta pembukaan Prodi baru.

Berdasarkan pada permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 bentuk pembelajaran/kegiatan di luar Kampus meliputi; pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, riset/penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun Desa/kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari dan Riant Nugroho (2021) dengan tujuan untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur yaitu menitikberatkan penelitian pada wawancara dengan Dekan, beberapa Kaprodi, dosen wali/pembimbing dan mahasiswa FISIP UPN Veteran Jawa Timur.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan telah melaksanakan Pendidikan bela Negara,

yang berkepribadian, multikultural dan toleransi. Hanya saja dalam pengimplementasiannya terdapat berbagai masalah seperti sulitnya mengkonversikan mata kuliah, minimnya kemitraan melaksanakan kegiatan di luar Prodi, Metode kerja sama antar PT yang rumit tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar Prodi, adanya kuota yang terbatas pada program pertukaran mahasiswa, Dosen pembimbing kurang menguasai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga informasi yang disampaikan belum memuaskan mahasiswa.

Penerapan pelaksanaan MBKM yang menjadi pemeran utama dalam kebijakan MBKM adalah mahasiswa dan dosen, namun pengetahuan tentang kebijakan MBKM masih di dominasi oleh para dosen, sementara yang menjadi sasaran utamanya program MBKM adalah mahasiswa karena ini bertujuan untuk menghubungkan antara pendidikan dengan dunia kerja dan industri. Keberlanjutan Kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun yang akan datang kami harapkan memerlukan umpan balik dari semua pihak yang terlibat yaitu Pimpinan Fakultas dan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Mitra industri serta Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas, maka peneliti akan mencoba melakukan studi penelitian tentang bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan bentuk

kegiatan pembelajaran program MBKM pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidaklah sepenuhnya dapat berhasil jika para mahasiswa, dosen maupun pihak yang berkepentingan kurang koordinasi dan mengetahui kebijakan program tersebut. Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di Universitas Kampus Muhammadiyah Makassar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan program MBKM di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

Berdasarkan pada tujuan penelitian, adapun hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik dari sisi akademik maupun sisi praktis. Manfaat dari sisi akademik antara lain:

1. Menambah pemahaman terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
2. Memberikan gambaran terkait dengan kebijakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diimplementasikan khususnya di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari sisi kegunaan praktis adalah sebagai bahan masukan kepada pemangku kepentingan atau pihak terkait pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah diterapkan sampai saat ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam menulis dan menambah teori yang relevan kaitannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Misnawati dan Zurain (2023), Dampak Implementasi Kebijakan Program Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak implementasi MBKM dapat meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa setelah mengikuti program MBKM.
2. Ratna Puspitasari dan Rian Nugroho (2021), Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip UPN Veteran Jawa Timur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sudah terlaksana dengan cukup baik karena melatih mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya secara baik.
3. Yoga Budi Bhakti, Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Awaluddin Tjalla, Anan Sutisna (2022), Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM di Perguruan

Tinggi, yang dimana tergantung pada Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang dijalankan dan dilaksanakan.

4. Rodiyah (2021), Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. Hasil penelitian ini menganalisis berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kaitannya dalam membentuk karakter mahasiswa hukum yang profesional dan berkarakter.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka dapat di simpulkan bahwa terdapat 4 penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama yaitu terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan terdapat 1 peneliti terdahulu yang memiliki variabel yang berbeda yaitu. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah indikator yang digunakan dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya di 2 program studi yang berbeda.

## **B. Teori dan Konsep**

### **1. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat”. Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Anderson bahwa konsep kebijakan publik tersebut memiliki beberapa implikasi seperti kesatu pada titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik yang berorientasi pada maksud dan bukan perilaku yang sembarangan. Secara luas kebijakan publik pada sistem politik modern bukan suatu hal terjadi melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat pada sistem politik.

Berdasarkan Wibawa (2011) dalam Setyawan (2017) berpendapat Kebijakan publik ini dibuat oleh pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan organ supra-negara. Adapun pemerintah yang dimaksud seperti Negara, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa, RW, RT. Sebagai tambahan, supra-Negara salah satunya ASEAN, semua merupakan sistem politik. Adapun kebijakan publik berkenaan pada penggunaan sumber daya publik dari sisi hubungan positif atau aktif dan negatif atau pasif. Melalui pandangan tersebut bahwa konteks negara bukan harus diidentik di wilayah yang luas seperti Indonesia. Akan tetapi, yang ditekankan

bahwa wilayah yang ada pemerintah di dalamnya harus memiliki pengaturan untuk hidup bersama.

Menurut Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Menurut Sulaiman (1998: 24) kebijakan publik suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan

Menurut William N. Dunn (2000:132) Kebijakan publik adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Menurut Inu Kencana, 1999:106). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik

Secara umum istilah “Kebijakan” atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17). mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Anderson (dalam Hill *and* Hupe 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan.

Carl J.Freadrich sebagaimana yang dikutip oleh Taufiqurakhman (2014) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian aksi atau tindakan yang direncanakan oleh individu,

kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Dalam lingkungan ini, ada hambatan dan kesempatan yang mempengaruhi pelaksanaan usulan kebijakan dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Solichin Abdul Wahab (2008: 40- 50) dalam Taufiqurakhman (2014) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang opini dan merupakan ajang perbincangan para pakar. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan wajib dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sesungguhnya tidak serta merta bisa dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup sikap dan harapan- harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan aksi ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan umumnya memiliki hasil akhir yang hendak dicapai
- f) Tiap kebijakan mempunyai tujuan ataupun target khusus baik eksplisit ataupun implisit
- g) Kebijakan timbul dari sesuatu proses yang berjalan sepanjang waktu
- h) Kebijakan mencakup hubungan- hubungan yang bersifat antar- organisasi serta yang bersifat intra organisasi

- i) Kebijakan publik walaupun tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga- lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu diformulasikan ataupun didefinisikan dengan cara subyektif.

Perumusan kebijakan tidak lepas dari namanya pelaksanaan kebijakan. Mthethwa (2012) seperti yang dikutip oleh Ramdhani (2017) bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia.

## 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"to implement"*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* berarti *"to provide the means for carryng out"* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan *"to partical effect"* (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* (Hill and Hupe 2002). Dalam KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan,

dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill *and* Hupe 2002).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno 2007). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang di maksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan di

pandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan memiliki banyak pengertian dari berbagai ahli, seperti yang disebutkan oleh Kasmad (2018:30) antara lain:

- a) Masmanian serta Sabatier (1983:71), memandang implementasi kebijakan selaku penerapan berbagai keputusan, baik yang berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
- b) Van Meter dan Van Horn (1978: 447), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta, yang ditunjukkan pada tercapainya tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- c) Wahab (1997: 50), implementasi kebijakan merupakan sesuatu proses melakukan keputusan kebijakan”.

Oleh karena itu menurut Jones (1996: 293-294) “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan.” Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut.

Beberapa konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau melakukan tindakan nyata dari suatu kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini memerlukan pelaksanaan tindakan praktis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi, perusahaan, dan masyarakat dapat terlibat. Dalam hal ini, tantangan dan hambatan mungkin muncul dan harus dikelola untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien.

### **3. Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Agar kebijakan implementatif, maka dikenal beberapa pendekatan. Secara teoritik empirik, pendekatan-pendekatan ini dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Walau dari berbagai pendekatan praktiknya membutuhkan pertimbangan komprehensif sehingga pendekatan yang dipilih, diadaptasi atau mungkin bahkan dikombinasi adalah teknis sesuai kebutuhan. Untuk kepentingan implementasi kebijakan, bukan merupakan monopoli secara linier dari hanya para ahli kebijakan saja. Tetapi bisa diadopsi dari para ahli ilmu - ilmu sosial lain, baik dari pakar ilmu politik, pakar organisasi dan manajemen maupun dari para ahli lainnya. Dengan kata lain untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Henry (1998:33) sebagai berikut:

a) Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Misalnya adanya beberapa kelompok kepentingan penentang kebijakan yang berusaha untuk mengganjal bahkan memboikot usaha dari berbagai pendukung kebijakan yang ada dan serta merta dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Rhodes, N (Wahab: 2004:29).

b) Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat "organik" nampak relevan untuk implementasi kebijakan, ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c) Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai teknik dan metode yang ada. Prosedur di maksud di antaranya terkait dengan proses penjadwalan (*scheduling*) perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*) kebijakan publik.

d) Pendekatan Perilaku

Analisis keprilakuan (*behavioral analysis*) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai “*organizational development*” atau pengembangan organisasi. Pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keprilakuan (Eddy, 1981:72).

**4. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan**

Tahap-tahap implementasi kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahapan implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap Kedaulatan Negara lain.
- b) Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non *self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

## 5. Proses Kebijakan Publik

Menurut Howlet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Proses tahapan kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarmo (2007) sebagai berikut:

- a) Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
- b) Tahap formulasi kebijakan  
Masalah yang telah masuk di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- c) Tahap adopsi kebijakan  
Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang di inginka.

**Tabel 2.1 Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan**

<b>Fase</b>	<b>Karakteristik</b>
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali sementara lainnya ditunda untuk waktu lama
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, Legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan

Sumber : William N. Dunn, 2000:24.

Pada dasarnya kebijakan diciptakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, setelah kebijakan dibuat, tugas berikutnya adalah mengatur pelaksanaan atau melakukan implementasi dari kebijakan tersebut. Dapat pula dikatakan apapun bentuk produk kebijakan, fokus utamanya adalah bagaimana menerapkan kebijakan itu supaya dapat diterapkan. Untuk memahami lebih jauh mengenai akar implementasi kebijakan, berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai mana yang disebutkan oleh Kadji (2015:56) antara lain:

#### **1) Model Van Meter dan Van Horn**

Model ini mengisyaratkan implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya, seperti dana dan insentif lain, untuk sukses. Kebijakan yang tidak memiliki dana memadai akan mengalami kinerja rendah. Standar dan sasaran yang jelas tidak cukup untuk memastikan implementasi yang efektif tanpa komunikasi yang baik antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua pihak yang terlibat harus memahami apa yang diinginkan oleh kebijakan dan bertanggung jawab atas implementasinya. Komunikasi sering dianggap rumit dan berpotensi menyebabkan penyimpangan. Dalam organisasi publik, pemimpin harus dapat mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi staf untuk bekerja sesuai dengan tujuan kebijakan publik.

Hal di atas pula berkaitan erat dengan karakter birokrasi pelaksana. Bentuk birokrasi eksekutif mempunyai norma serta pola hubungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman,1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

- e) Disposisi atau sikap para pelaksana

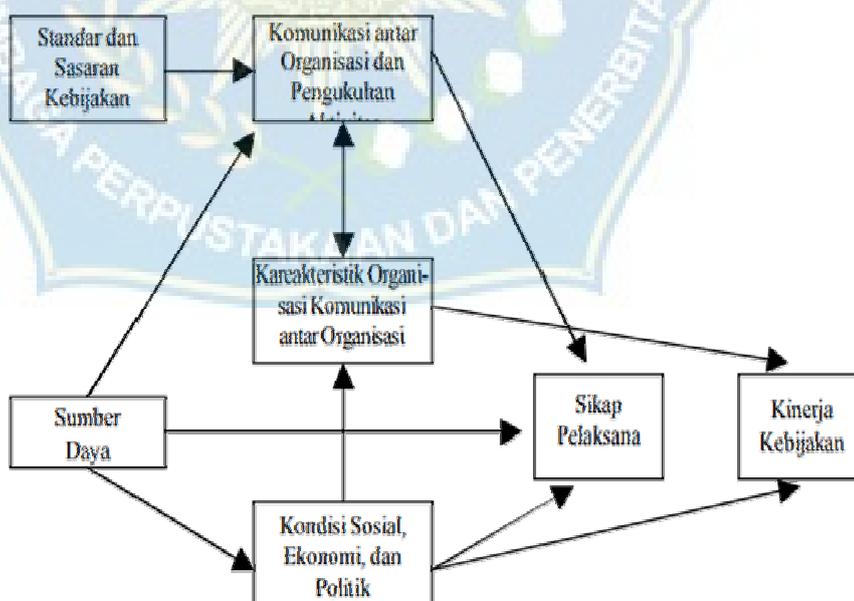
Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

g) Kinerja Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006).



**Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn (1975:463)**

## 2) Model Warwic

Menurut (Kadji, 2015) mengatakan bahwa pada Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

### a) Kemampuan organisasi

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang sudah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga (3) unsur utama yaitu kemampuan teknis, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang bekerja dalam bidang dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait serta meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan SOP.

### b) Informasi

Minimnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program.

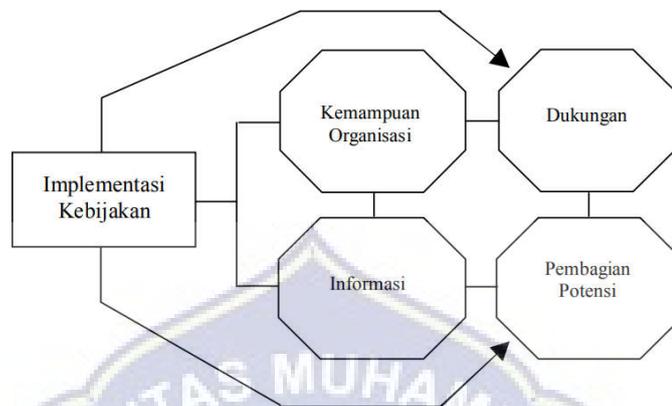
### c) Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit pada saat isi kebijakan berlawanan dengan opini atau keputusan mereka.

### d) Pembagian potensi

Pembagian wewenang serta tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-

pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.



**Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Warwic**

### 3) Model Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (1980) Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
- c) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).

- d) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e) Para pelaksana program (*program implementators*).
- f) Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- a) Kekuasaan (*power*).
- b) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
- c) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
- d) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

#### 4) Model Hoogerwerf

Menurut Hoogerwerf (1983:163) untuk berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan diperlukan 4 (empat) syarat-syarat yang mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu;

##### a) Isi Kebijakan

Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kebijakan itu jelas baik mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai cukup rinci, tersedianya sarana dan penetapan prioritas atau program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dapat gagal apabila isi kebijakan itu sifatnya samar-samar, kabur, tidak terinci baik sarana atau prioritas, program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

##### b) Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan suatu kebijakan memperlihatkan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang

perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kekurangan informasi pada aktor objek kebijakan.

**c) Dukungan bagi kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan akan sulit jika pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan. Dukungan ini tergantung dari berbagai hal, seperti kurangnya informasi, kurangnya imbalan jasa dan sebagainya. Jadi untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan baik saran maupun biaya.

**d) Pembagian potensi**

Pembagian potensi yang tidak seimbang antara para aktor dapat pula menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian potensi ini antara lain diferensiasi tugas, delegasi wewenang atau tanggung jawab, koordinasi dan sebagainya. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan kebijakan maka diperlukan pembagian potensi yang seimbang di mana di dalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan

kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

### **C. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Konsep dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus merdeka adalah melahirkan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inovasi di bidang pendidikan yang bergerak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Adapun esensi dari kampus merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*). Kampus merdeka menawarkan tantangan serta kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menggali potensi diri lebih dalam lagi melalui pengembangan inovasi, kreativitas, kepribadian serta mampu mengembangkan kemandirian dalam melakukan praktek secara langsung di lapangan.

Terdapat 4 (empat) pokok kebijakan yang ada di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut:

#### **1. Pembukaan program studi baru**

Kebijakan yang pertama adalah pembukaan program studi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi

Swasta (PTS) yang terakreditasi A dan B. Serta Perguruan Tinggi diberi kewenangan untuk membuka program studi baru jika:

- a) PT Memiliki akreditasi A dan B.
- b) Jika memiliki kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, intitusi multilateral atau universitas Top 100 ranking QS.
- c) Bukan program studi pendidikan dan kesehatan

## 2. Sistem akreditasi Perguruan Tinggi

Kebijakan pokok yang kedua adalah re-akreditasi Perguruan Tinggi yang bersifat sukarela bagi PT dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Berdasarkan kebijakan Kampus merdeka untuk akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT akan diperbarui secara otomatis selama 5 (lima) tahun sekali.

## 3. Perguruan Tinggi berbadan hukum

Kebijakan pokok yang ketiga adalah memberikan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH).

## 4. Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi

Kebijakan pokok selanjutnya adalah memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester terhadap mahasiswa untuk secara sukarela boleh diambil boleh tidak. SKS yang wajib diambil dari program studi asal adalah sebanyak 5 (lima) semester dari semester yang telah ditentukan sedangkan untuk semester berikutnya boleh diambil di luar program studi dan perguruan tinggi.

## 5. Landasan hukum kampus merdeka

- a) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, standar penelitian yang berkaitan dengan sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.
- b) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan maka diberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum
- c) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Akreditasi. Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi.
- d) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi. Diterbitkan untuk mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.

#### **D. Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dari Nadiem

Makariem melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dengan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun Perguruan Tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti

Program Merdeka Belajar dapat berupa program Nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan Pendidikan Tinggi.

Seperti yang dikutip dari buku panduan Implementasi kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (2021) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 memberikan pertimbangan utama pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut:

#### **PASAL 15**

1. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).

2. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi tidak berlaku bagi program sarjana terapan di bidang kesehatan

### **PASAL 18**

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
2. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program studi pada Perguruan Tinggi yang sama.

Diketahui di Indonesia, lembaga pendidikan tinggi telah menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seluruh delapan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah dilaksanakan dan mendapat respon yang sangat positif dari mahasiswa di seluruh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia (Suryani, Mbagho & Mei, 2022; Aisyianita et al., 2022; Nita et al., 2022). Mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditawarkan, termasuk Program Kampus Mengajar. Adapun Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Untuk mendorong siswa untuk menguasai berbagai bidang studi yaitu relevan dengan pasar kerja.

2. “Hak belajar selama tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skill* maupun *hard skill*, sehingga lebih siap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mempersiapkan lulusan sebagai calon pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian. Melalui program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel, diharapkan kebijakan ini akan memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Adanya Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mewujudkan kampus yang *link and match* dengan dunia kerja. Adapun manfaat merdeka belajar kampus merdeka yaitu:

1. Kegiatan dapat dikonversi menjadi SKS
2. Perluas jaringan hingga ke luar program studi dan Universitas
3. Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari satu semester
4. Menimbah ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka

Implementasi program MBKM di Perguruan Tinggi Indonesia sudah berjalan secara beriringan dengan penyusunan kebijakan di tingkat Program Studi. Pelaksanaan program MBKM mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan antusiasnya mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun berdasarkan hasil kajian beberapa artikel terkait

pelaksanaan program MBKM ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berikut kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam implementasi program MBKM yaitu:

1. Program studi kesulitan dalam melakukan rekognisi jumlah sks
2. Program studi kesulitan menyusun kurikulum MBKM
3. Tidak seluruh prodi dalam PT yang sama menjalankan MBKM
4. Mitra dalam kegiatan MBKM magang dan kewirausahaan masih terbatas
5. Terlambatnya penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM
6. Tidak ada program MBKM yang memfasilitasi penyandang disabilitas
7. Tidak mudah dalam memperoleh mitra untuk kerjasama
8. Proses kerjasama antar Perguruan Tinggi yang rumit
9. Terlalu banyak program dan kegiatan secara bersamaan
10. Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi
11. Adanya penetapan kuota pada program MBKM

Terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan pada pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti yang dituangkan dalam buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Mendikbud (2020) yaitu peran pihak terkait dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti pada uraian berikut.

## 1. Peran Pihak Terkait

### a) Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak untuk mahasiswa (dapat diambil/tidak) untuk boleh mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS dan boleh mengambil SKS di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama ( MoU/SPK) dengan mitra.

### b) Fakultas

Peran Fakultas pada Perguruan Tinggi dalam pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi serta menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

### c) Program Studi

Peran Civitas Program Studi Perguruan Tinggi dalam pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka

- 2) Menyediakan mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melaksanakan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan pengganti mata kuliah daring.

**d) Mahasiswa**

Peran dan keterlibatan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Merancang bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Memenuhi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

**e) Mitra**

Peran Mitra dalam pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

## **2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program studi dan di luar Program studi meliputi:

### **a) Pertukaran Mahasiswa**

Salah satu aktivitas populer bagi mahasiswa di luar kampus adalah pertukaran mahasiswa. Mereka dapat mengambil kelas di Universitas luar atau dalam Negeri untuk memperoleh pengetahuan dan suasana baru. Namun, semuanya harus sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nilai dan kredit yang diterima dari Universitas luar akan disesuaikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi (Prahani et al., 2020 dalam Hidayatullah, 2021).

### **b) Magang**

Adanya kegiatan magang sebagai mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kondisi dunia kerja secara nyata melalui pengalaman langsung. Hal ini akan memberikan motivasi

tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan memperkuat keterampilan mereka di dunia kerja.

**c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Berbagai survei, mutu pendidikan kita masih butuh atensi khusus. Selain memberikan pengalaman mengajar, pelibatan mahasiswa yang berminat di bidang pendidikan dalam program asistensi ini akan membantu meningkatkan pemerataan kualitas serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan PT dan perkembangan zaman (Wardani, 2022).

**d) Penelitian**

Kemampuan berfikir ilmiah atau meneliti harus ditingkatkan dengan berbagai bentuk kegiatan. Oleh sebab itu, di PT ada mata kuliah khusus, misalnya metode penelitian, studi operasional, studi laboratorium, dan sejenisnya yang berujung pada tugas akhir. Untuk memperkuat kompetensi studi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan peluang untuk mahasiswa untuk belajar langsung di lembaga riset atau pusat studi.

**e) Proyek Kemanusiaan**

Bentuk kegiatan ini di munculkan karena banyaknya bencana yang terjadi dan memerlukan tindakan dan kemampuan dalam menanganinya. Selama ini, PT banyak membantu mengatasi bencana melalui berbagai program. Oleh sebab itu, program ini harus diakui serta disetarakan dengan mata kuliah tertentu. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus

Merdeka (MBKM) memberikan peluang untuk mahasiswa untuk mengikuti proyek ini di lembaga- lembaga kemanusiaan, baik di dalam maupun luar Negeri.

**f) Kegiatan Wirausaha**

Bentuk peningkatan kemampuan dan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha, beberapa kegiatan dan perkuliahan harus diterapkan. Walaupun ada mata kuliah kewirausahaan di beberapa program studi, namun banyak mahasiswa yang belum memiliki minat dan tidak terkelola dengan baik dalam bidang ini, padahal peluang sukses cukup tinggi. Oleh karena itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan atau dapat diakui dan disetarakan dengan mata kuliah tertentu.

**g) Studi/Proyek Independen**

Tidak sedikit mahasiswa yang mempunyai gagasan-gagasan inovatif dan kreatif dalam mengikuti perlombaan di tingkatan Nasional maupun Internasional. Oleh sebab itu, Prodi wajib mengapresiasi hasil perlombaan ini dengan mengakui dan menyetarakan dengan mata kuliah tertentu melalui skema studi atau proyek independen.

**h) Membangun Desa/ KKN Tematik**

Kerja Kuliah Nyata (KKN) umumnya merupakan mata kuliah yang harus ditempuh. KKN tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman hidup di

tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya mempertajam *soft skill*, kerja sama, dan *leadership* dalam ikut membangun desa, KKN ini juga bisa digunakan untuk penelitian yang relevan dengan prodinya dan hasilnya disetarakan dengan tugas akhir.

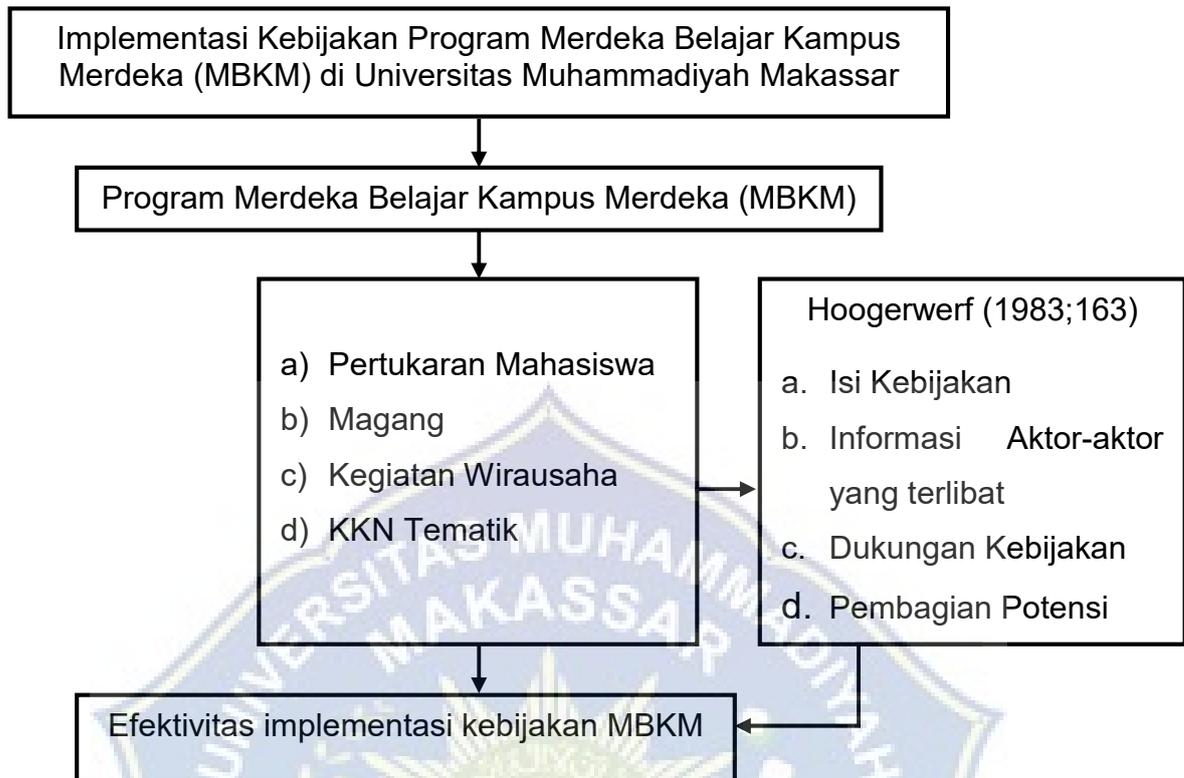
#### **E. Kerangka Pikir**

Tujuan dari kerangka pikir penelitian adalah menggambarkan struktur untuk studi dan memandu peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka pikir penelitian berfungsi sebagai fondasi untuk studi dan memberikan kerangka untuk interpretasi hasil. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum Pendidikan Tinggi dalam peningkatan kualitas pembelajaran serta lulusan Pendidikan Tinggi. Dasar hukum penerapan program kebijakan Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program studi antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Penelitian mengenai implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan apa saja kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar

Adapun yang menjadi indikator dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu; isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, dan pembagian potensi dengan menggunakan teori Hoogerwerf (1983;163). Salah satu alasan atau pertimbangan memilih teori Hoogerwerf karena dari pelaksanaan kebijakan di perlukan 4 (empat) syarat-syarat tersebut untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu; Pertukaran Mahasiswa, Magang, Kegiatan Wirausaha, dan KKN Tematik sehingga implementasi kebijakan MBKM dapat diketahui manfaatnya. Berdasarkan uraian telah dipaparkan di atas maka peneliti menyusun kerangka pikir pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.3 Kerangka Pikir**

## F. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan arahan batasan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar terkait pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Unismuh Makassar.

Adapun indikator yang digunakan penelitian ini mencakup sebagai berikut :

### 1. Isi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan MBKM ada beberapa kebijakan yang di laksanakan dan yang di tetapkan mulai dari konversi sks dan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program

studi, sehingga prodi perlu menerapkan kebijakan mengenai konversi sks hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi, karena prodi diberikan kewenangan untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jurusannya.

## **2. Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat**

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya perlu diketahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat langsung dan apa saja peranan dan kewenangannya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar yaitu; Rektor, LP2AI, Fakultas, Prodi, dan Mahasiswa. Aktor inilah mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kekurangan informasi pada aktor objek kebijakan

## **3. Dukungan bagi kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan MBKM tentunya harus terdapat dukungan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia karena akan sulit jika pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan.

## **4. Pembagian potensi**

Pembagian potensi yang tidak seimbang antara para aktor dapat pula menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian potensi ini di maksudkan untuk memudahkan dalam

membagi peran dan tugas para aktor dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai bidangnya dalam pelaksanaan kebijakan MBKM.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deksripsi dengan cara sistematis dan akurat terkait fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2018).

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Fenomenologi. Penelitian Fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan serta pemahaman individual tentang pengalaman-pengalaman

Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui pemantauan, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata, 2011). selain itu, pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Peneliti melaksanakan penelitian di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dan salah satunya di Prodi Agribisnis dan

Prodi Hukum Ekonomi Syariah karena Prodi ini merupakan salah satu yang paling banyak melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dibandingkan prodi-prodi lainnya yang ada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

### **C. Sumber Data**

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan dari sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dapat langsung diperoleh di lapangan tempat penelitian. Data ini berbentuk hasil wawancara dari subjek penelitian atau informan, maupun seluruh yang dicermati selama proses penelitian.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian ini merupakan arsip yang diperoleh melalui pencarian pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan keputusan, peraturan perundangan, laporan penelitian, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen berupa foto - foto, serta naskah-naskah yang penting sebagai materi referensi untuk mendiskripsikan fenomena penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau informan adalah Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktvitas Instruksional (LP2AI), Ketua Prodi Agribisnis, ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syariah, Dosen, dan Mahasiswa serta mitra Universitas Muhammadiyah Makassar, serta objek penelitian adalah implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian**

No	Nama	Inisi	Jabatan	Ket
1	Dr. Nasrun Syahrir, M.Pd	NS	Ketua LP2AI	
2	Dr. Nadir, SP., M.Si	ND	Ketua Prodi Agribisnis	
3	Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME	HS	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	
4	Muhammad Iswan	MI	Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Pertukaran mahasiswa
5	Andi Nurzakiyah	AN	Mahasiswa Prodi Agribisnis	Magang
6	Fira Fajriana	FF	Mahasiswa Prodi Agribisnis	Pertukaran mahasiswa
7	Wahyu Yulyusra	WY	Mahasiswa Prodi Agribisnis	KKN Tematik
8	Alfira Nurafni	AN	Mahasiswa Prodi Agribisnis	Kewirausahaan
9	Rahmawati	RM	Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Magang
10	Umi Rahayu Sari	UR	Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Kewirausahaan
11	Irfan	IF	Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah	KKN Tematik
12	Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P	SM	DPL Prodi Agribisnis	DPL
13	Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME		DPL Prodi Hukum Ekonomi Syariah	DPL
14	Dr. Almusawwir, SH., MH	AL	DPL Ilmu Hukum	Mitra dari Unibos
15	Dr. Oetami Dwi Hajoeningtyas, S.P., M.P		DPL Agroteknologi	Mitra dari Unismuh Perwokerto

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi seperti pada uraian berikut.

### 1. Wawancara

Proses wawancara ini dilakukan dengan Ketua LP2AI, Ketua Prodi Agribisnis, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen dan Mahasiswa untuk menggali data informasi mendalam yang ada pada objek penelitian terkait dengan topik yang diangkat melalui tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam, kamera, alat tulis dan alat pendukung lainnya. Adapun yang menjadi instrumen wawancara meliputi; Isi kebijakan, Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, Dukungan bagi kebijakan, dan Pembagian potensi.

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengamati langsung di tempat penelitian, serta mengumpulkan data mengenai informasi terkait dengan implementasi kebijakan MBKM.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan studi yang dilakukan peneliti untuk menemukan bukti fisik yang disampaikan informan saat wawancara. Dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah dokumen mengenai data jumlah mahasiswa dan staf pengajar untuk menguatkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan MBKM.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Informasi dianalisis dengan memakai 3 tahap analisa informasi: kondensasi informasi (*information condensation*), menyuguhkan informasi (*information display*), serta menarik ikatan ataupun konfirmasi (*conclusion drawing and verification*). Dengan cara lebih mendetail, langkah- langkah itu hendak terapkan sebagaimana berikut ini (Miles, Meter. B, Huberman, A. Meter,& amp; Saldana, 2014): Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar tingkatan pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Metode analisa data yang digunakan peneliti merupakan bentuk analisis interaktif. Adapun proses menganalisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992, h.16) yaitu:

##### **1. Reduksi data (*data reduction*)**

Reduksi data merupakan sesuatu proses pemilihan, memfokuskan atensi pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari sebuah catatan-catatan tertulis di lapangan. Sederhananya, reduksi kata merupakan merangkum, memilah dan memfokuskan keadaan yang penting

dari data yang ditemukan. Reduksi kata diawali pada awal kegiatan penelitian hingga dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk cerita pendek, diagram dan hubungan antar kategori ataupun sejenisnya. Data yang didapat berbentuk kalimat-kalimat, kata-kata yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga penyajian materi/data merupakan kumpulan informasi yang tersusu secara sistematis yang memungkinkan menarik kesimpulan.

## 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan tentunya berdasarkan dari hasil analisis data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi maupun dokumentasi. Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan keputusan terhadap temuan data untuk memperoleh hasil temuan yang sesuai dengan indikator penelitian.

## G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2009). Dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data agar data valid dan dapat dipertanggung jawabkan yang telah dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dibagi

menjadi tiga, yaitu: (1) triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain, (2) triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beragam teknik untuk mengungkap data yang dilakukan kepada sumber data, dan (3) triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Komariah, Aan., Satori, 2011).

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali atau mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan penelitian dilakukan peneliti untuk melakukan pengecekan informasi/data antara hasil wawancara dengan dokumen dari berbagai sumber data yang sama

#### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu peneliti akan mempertimbangkan waktu pengumpulan data antara bisa pagi, siang, ataupun sore dsb. Karena besar kemungkinan informan bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih santai dan lugas. Maka dari itu pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara, atau dengan metode lain dengan waktu atau kondisi yang berbeda.

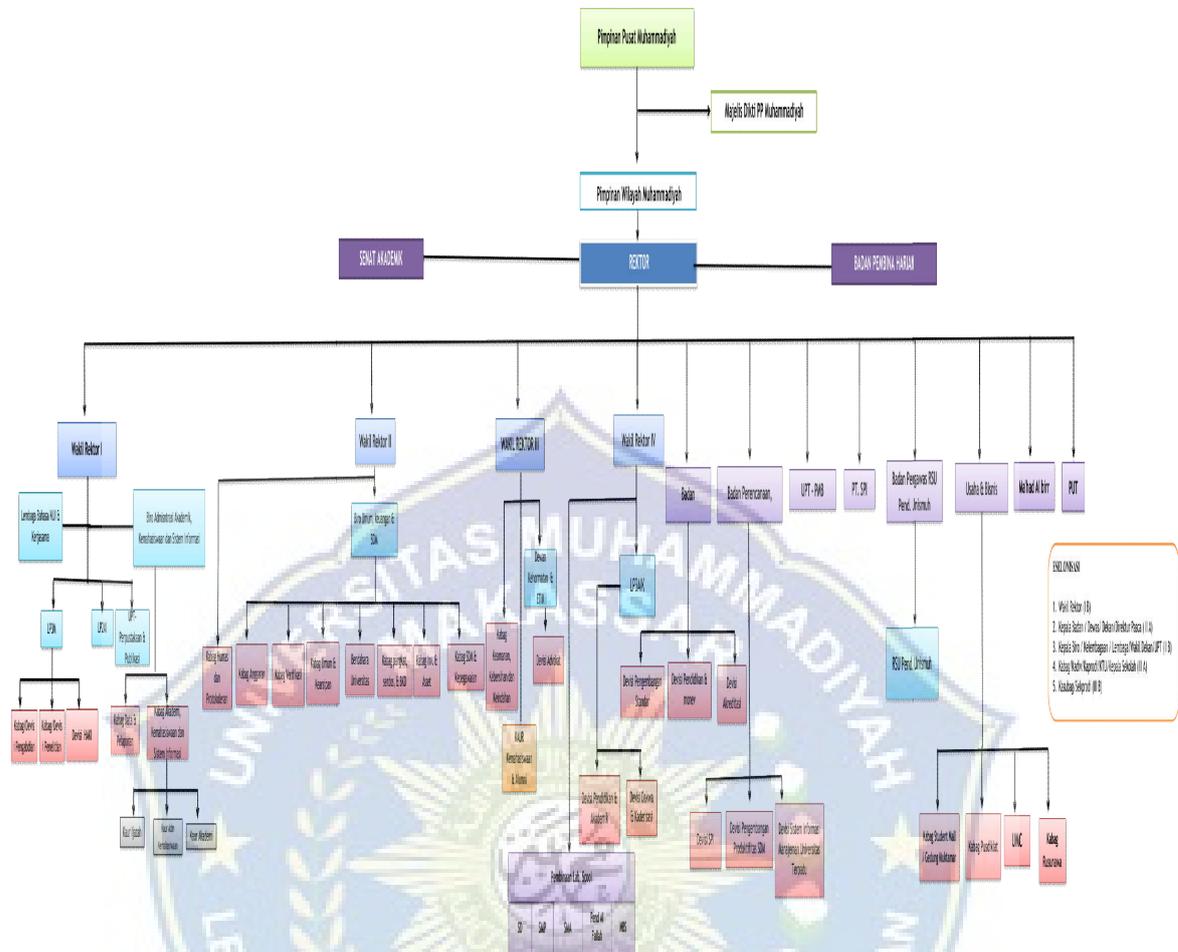
## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur yang di dalamnya terdapat budaya pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah yang di mana nama Muhammadiyah yang terintegrasi oleh nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan. Pada tahun 2003 Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami masa transisi yaitu perubahan formasi kepemimpinan di mana hal ini merupakan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar terus menjaga capaian pendahulu yang kemudian dikembangkan menjadi capaian yang lebih baik serta berkomitmen untuk:

1. Memelihara kepercayaan masyarakat;
2. Mencapai keunggulan kompetensi yang semakin ketat;
3. Mewujudkan kemandirian dan pengelolaan dan pengembangan diri yang diharapkan dapat membawa Unismuh Makassar menjadi Universitas terkemuka.



**Gambar 4.1 Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar**  
**Sumber: unismuh.ac.id/35**

## 1. Rektor

### a) Tugas Rektor

- 1) Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian pada masyarakat dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah;
- 2) Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah;

- 3) Bersama BPH mengusahakan sumber-sumber keuangan untuk pembayaran Universitas;
  - 4) Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh wakil-wakil Rektor,
- 1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
  - 2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul BPH bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
2. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)
- Pelaksanakan tugas dibawah koordinasi Wakil Rektor 1 sebagai pelaksana teknis yang mengkoordinasikan tugas mendesain pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pelatihan terkait pengembangan kurikulum, pembelajaran, sarana pembelajaran dan media pembelajaran serta bertanggung jawab kepada Rektor atas pelaksanaan tugasnya.
3. Dekan
- a) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-

Islam Ke Muhammadiyah dan kaderisasi membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

- b) Dekan diangkat dan di berhentikan oleh Rektor berdasarkan usul senat akademik Fakultas dan pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dekan dibantu oleh Wakil-wakil Dekan status Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### 4. Program Studi (Prodi)

- a) Melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di tingkat program studi;
- b) Menyusun rencana dan program kerja program studi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat program studi.
- c) Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan;
- d) Melaksanakan program di bidang akademik, vokasi dan profesi;
- e) Melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kerja sama internasional;
- f) Melaksanakan pemantauan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh program studi;
- g) Melaksanakan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi;
- h) Mengimplementasikan kerja sama internasional;

- i) Mengevaluasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kerja sama internasional;
- j) Melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi;
- k) Mengembangkan kapasitas sumber daya pendukung kegiatan Tridarma yang dilaksanakan oleh program studi;
- l) Melaksanakan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, karir mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
- m) Melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan dan kerja sama dengan alumni;
- n) Melaksanakan kegiatan pembinaan kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi untuk civitas akademika di program studi;
- o) Melaksanakan kegiatan penjamin mutu di tingkat program studi
- p) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok bidang ilmu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi kepada fakultas secara berkala.
- q) Melaksanakan pengembangan AIK

#### 5. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta yang menjadi keunggulan program studi; dan .

## 6. Mahasiswa

- a) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun akademik berjalan dan mengikuti pendidikan di Kampus Unismuh Makassar.
- b) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- c) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- d) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

## 7. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

Visi terkemuka bagi Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk:

- a) Memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.
- b) Meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
- c) Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Adapun Misi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
- b) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
- c) Menumbuh-kembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing;
- d) Menumbuh-kembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah;
- e) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan masyarakat.

Setiap komitmennya, Universitas Muhammadiyah Makassar selain menyediakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, juga menyediakan berbagai kesempatan bagi mahasiswa untuk membina keahlian-keahlian yang nantinya dibutuhkan dalam dunia kerja. Salah satu tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, mengingat sekarang berada di zaman *“hard skill is necessary but it not sufficient”* sehingga untuk menghadapi hal tersebut Universitas Muhammadiyah Makassar menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat melatih *soft skill* berupa kegiatan ekstrakurikuler yang dijadikan kegiatan pelengkap sesuai dengan bidang yang diminati mahasiswa. Adanya kegiatan ekstrakurikuler menjadi upaya untuk pemenuhan kebutuhan, hobi,

dan juga pembinaan mental agar mahasiswa dapat melatih diri serta memiliki berbagai keahlian.

Adapun berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar yang pertama adalah Organisasi kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Selanjutnya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu Kepanduan Hizbul Wathan, Seni Bela Diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Pemerhati Alam dan Lingkungan (PAHALA), Olahraga: Futsal, Volly Ball, Basket, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Takraw, Catur, Seni Budaya Talas: Teater, Tari, Sastra, Musik, Rupa dan Design, photography, Film (Cinema Talas), Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit 114, Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA), Lembaga Pers Corong, Bahasa dan Bola. <https://unismuh.ac.id/ekstrakurikuler/>.

#### 8. Profil singkat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Program MBKM menawarkan lebih banyak bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih bidang yang diminati. Terdapat beberapa jalur dalam pelaksanaan MBKM yaitu:

a) Program MBKM yang ditawarkan langsung dari website resmi MBKM.

Adapun mekanisme pendaftaran MBKM melalui website resmi melalui adalah mahasiswa melakukan pendaftaran program di website <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.

Melalui laman ini mahasiswa melakukan pendaftaran serta mengikuti seleksi secara online. Laman ini juga dilengkapi dengan journal/logbook yang akan diisi oleh mahasiswa mengenai apa saja yang telah didapatkan selama pembelajaran baik itu dalam bentuk harian mingguan hingga laporan akhir pembelajaran.

- b) Program bantuan program studi menerapkan kerja sama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Keberhasilan pelaksanaan MBKM terletak pada bagaimana Perguruan Tinggi menerapkan kebijakan MBKM, yang dimana Perguruan Tinggi harus memiliki keberanian untuk untuk mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel. Sehingga setiap program studi dituntut untuk dapat mengembangkan kurikulum secara adaptif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga diharuskan program studi untuk dapat bekerja sama dengan mitra untuk memperdalam kajian keilmuannya agar dapat mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan secara maksimal. Maka dari itu Direktorat Pendidikan Tinggi memberikan bantuan agar dapat menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM Wulandari Dewi at al (2021).

c) Penjaminan Mutu

Membuat kebijakan dan manual mutu terdapat 3 (tiga) elemen penting yaitu:

- 1) Perguruan Tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu yang terintegrasi dalam penjaminan mutu Perguruan Tinggi untuk program MBKM.
- 2) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program kampus merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan yang telah berlaku di Perguruan Tinggi.
- 3) Kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib di seminasikan dan disosialisasikan untuk para dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta yang mengikuti program.

Agar “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin maka diperlukan beberapa mutu diantaranya mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan persentasi hasil dan mutu penilaian. Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar Kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kriteria Kegiatan Di Luar Kampus**

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1	Pertukaran mahasiswa	Jenis mata mahasiswa yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus
2	Magang/Praktek Kerja	Mahasiswa terlibat secara aktif dan

		mendapatkan masukan terkait performa serta memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
3	Asistensi mengajar di satuan pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
4	Penelitian/riset	Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana serta harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
5	Proyek kemanusiaan	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan fokus pada pemecahan masalah sosial serta menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan
6	Kegiatan wirausaha	Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)
7	Studi Independen	Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini
8	KKN Tematik	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus pada Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUMDES serta pemecahan masalah sosial

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020

d) Melakukan monitoring dan evaluasi

Penjaminan mutu tentunya memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodek. Untuk menjamin mutu maka pihak pelaksana monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Evaluasi juga dilakukan agar untuk mengetahui kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program yaitu :

- 1) Prinsip penilaian dilakukan melalui “hak belajar 3 (tiga semester) mengacu pada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT

(Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan secara terintegrasi.

2) Aspek-aspek penilain

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
- c. Sikap
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas
- e. Kemampuan membuat laporan

3) Prosedur penilaian dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian hasil) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).

Penilaian dapat dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sedangkan untuk penilaian hasil berupa laporan yang dibuat oleh mahasiswa Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020).

## **B. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan menguraikan dan menganalisa rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar dan apa saja kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil temuan dilapangan dengan mengacu pada indikator

yang dijadikan rujukan dalam menemukan kendala tentang pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar. Pada penelitian ini di gunakan teori Hoogerwerf (1983:163) karena pelaksanaan kebijakan di perlukan 4 (empat) syarat-syarat tersebut untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu; Pertukaran Mahasiswa, Magang, Kegiatan Wirausaha, dan KKN Tematik.

Adapun deskripsi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut

### **1. Pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar**

Hadirnya kebijakan pembelajaran dengan Program MBKM, tentu saja memberikan banyak ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keilmuan di Perguruan Tinggi secara fleksibel, yang bukan hanya mengharuskan duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan, akan tetapi dapat pula mendapatkan ilmu dan keterampilan sesuai kompetensinya, melalui program-program yang dikembangkan oleh mitra yang ada di luar Kampus. "Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar Kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Kemudian, mahasiswa juga dapat mengambil sks di Prodi

lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh”.

Pembelajaran dalam program MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat melalui Program MBKM, dikenal adanya berbagai aktivitas unggulan yang dapat dilakukan di luar Kampus, antara lain: 1) Magang/praktek kerja, yakni kegiatan magang di sebuah perusahaan dan institusi pemerintahan; 2) Proyek di desa, yakni proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat; 3) Mengajar di sekolah, berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan dengan domisili sekolah yang berada di lokasi kota maupun terpencil; 4) Pertukaran mahasiswa, yakni, mengambil kelas atau semester di Perguruan Tinggi luar Negeri maupun dalam Negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan Pemerintah; 5) Penelitian/riset, Kegiatan riset akademik, baik sains

maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti; 6) Kegiatan wirausaha, yaitu mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai; 7) Studi/proyek independent, yakni mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain; 8) Proyek kemanusiaan, berupa kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar Negeri. Yang dimana, "Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya.

Oleh karena itu indikator yang menjadi rujukan penelitian ini mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

#### **a) Isi Kebijakan**

Adanya isi kebijakan akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program bentuk kegiatan pembelajaran dan akan menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana dalam melakukan adaptasi dengan kebijakan yang berkaitan jenis MBKM yang di jalankan dan konversi SKS. Di kampus Unismuh Makassar sudah melaksanakan program MBKM.. Oleh karena

itu isi kebijakan sangat perlu di butuhkan sebagai pedoman program kebijakan bagi aktor pelaksana karena dengan adanya kebijakan program-program bisa disusun untuk menjadi bahan pegangan dalam menjalankan pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran yang ada.. Selain dari pada itu, bila pelaksanaan mengenai isi kebijakan berlangsung lama, timbul kemungkinan terjadinya pergantian, pergeseran atau perubahan tujuan yang lebih besar.

Penerapan kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM selanjutnya adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana dalam melakukan bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM dengan kebijakan MBKM yang berkaitan jenis MBKM yang dijalankan di Unismuh Makassar seperti MBKM dari Kemendikbud. Hal ini dapat di perkuat dari hasil wawancara dengan informan Ketua LP2AI Unismuh Makassar Bapak N.S yang menyatakan:

“Secara umum kebijakan MBKM dari Kemendikbud diterima dan disambut baik oleh pimpinan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, seperti mengenai konversi SKS dan walaupun ada beberapa prodi belum bisa menerapkan secara penuh 20 SKS kami dari LP2AI yang diberikan tugas untuk membuat pedoman terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan MBKM sebagai bahan acuan tata cara pelaksanaan program bentuk kegiatan pembelajaran. Program ini di luncurkan tahun 2020 oleh pemerintah, kami selaku penanggungjawab wajib menyampaikan dan mensosialisasikan ke fakultas dan Prodi serta kepada mahasiswa terkait tata cara pelaksanaan MBKM ini”.(Hasil wawancara dengan NS Kamis 23 November 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan bapak NS yang telah disampaikan saat sekarang ini Unismuh sudah melaksanakan program MBKM dari Kemendikbud. MBKM di kampus Unismuh Makassar diterima dengan baik dan bahkan adanya program bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini di sambut dengan baik oleh pimpinan sampai ke tingkat bawah.

Hal senada juga yang di perkuat oleh kutipan wawancara dengan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak H.S yang mengatakan bahwa:

“Terkait adanya isi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dari Kemendikbud mengenai konversi SKS diterima dengan baik di Unismuh hal ini ditandai dengan program telah di ikuti banyak mahasiswa dan sejak di luncurkan oleh pemerintah tahun 2020 dan di perkuat terbitnya surat edaran dari Rektor tentang kebijakan MBKM di Unismuh Makassar sebagai pedoman pelaksanaan MBKM.” (Hasil wawancara dengan NN Kamis 23 November 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan NN yang telah di uraikan, dapat di ketahui bahwa isi kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan MBKM dari Kemendikbud diterima dengan baik oleh Kampus Unismuh Makassar. Dalam kebijakan MBKM, adapun yang menjadi aktor dalam pelaksanaan MBKM adalah Rektor, LP2AI, Fakultas, Prodi, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa. Inilah yang menjadi aktor dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakn MBKM di Kampus Unismuh Makassar. Sehingga kebijakan MBKM yang di

terapkan diterima dengan baik oleh semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Walaupun ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan MBKM tersebut.

Hal sama yang di perkuat oleh kutipan wawancara dengan ketua Prodi Agribisnis Bapak N.D yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebijakan MBKM dari Kemendikbud secara garis besar di sambut baik oleh semua pihak yang terlibat dalam program MBKM ini. Walaupun prodi belum bisa menerapkan secara penuh 20 SKS, tapi ini tidak membuat terkendala, hal ini dibuktikan dengan diikutinya program MBKM oleh kampus Unismuh Makassar sejak di luncurkannya oleh pemerintah pada tahun 2020”.(Hasil wawancara dengan ND Kamis 23 November 2023

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa gambaran umum kebijakan program bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM di sambut baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi perbedaan pendapat terkait aturan dalam penerapannya.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan oleh penulis ditemukan di lapangan bahwa kebijakan pelaksanaan MBKM di setiap fakultas dan Prodi yang di diterapkan semua sama dalam penerapannya. Hal ini juga di perkuat berdasarkan kutipan wawancara dengan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama M.I dari Fakultas PAI sebagai berikut:

“Iya sama saja karena kebijakan mengenai program MBKM yang dilaksanakan oleh prodi saya sejauh ini terarah dengan jelas karena sudah ada buku pedoman dan buku saku sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBKM. Melalui kegiatan pembelajaran program MBKM akan memperdalam kajian ilmu saya dalam memmahasiswai isu-isu yang berkembang saat ini”. (Hasil wawancara dengan MI Kamis 23 November 2023).

Hasil kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diterapkan sangat membantu mahasiswa karena prodi yang mengerti mengenai kebutuhan mahasiswanya mengenai program yang sesuai dengan jurusannya. Jadi kunci pelaksanaan kebijakan adalah mempunyai program kebijakan yang jelas seperti program MBKM yang di terapkan saat ini.

Hal senada juga yang di dukung oleh wawancara dengan mahasiswa jurusan Agribisnis atas nama A.N dari Fakultas Pertanian sebagai berikut:

“Terkait kebijakan MBKM konversi nilai dan sks sejauh ini kegiatan MBKM pihak prodi benar-benar mencover nilai-nilai saya karena adanya kebijakan MBKM dari prodi yang telah ada mengenai regulasinya soal sistem penerapannya di lapangan, sebagaimana keputusan pimpinan Universitas melalui surat keputusan Rektor di tembuskan kepada LP2AI, kemudian di sampaikan kepada stiap fakultas dan prodi”. (Hasil wawancara dengan AN Kamis 23 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan program bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang di jalankan oleh fakultas dan prodi sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang di

rasakan mahasiswa pada saat pembelajaran di kampus walaupun masih ada kendala.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan bapak NS selaku ketua LP2AI Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya adalah masalah pencairan dananya mahasiswa yang lambat dan bahkan lama mengantri juga untuk menunggu dananya keluar dari kementerian”.(Hasil wawancara dengan MI Kamis 23 November 2023).

Hal senada yang di ungkapkan informan dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Hal yang menjadi kendala soal dana yang terlambat cair, kemudian soal mengenai konversi nilai yang ada pada dosen yang kadang tidak paham dengan program ini”.(Hasil wawancara dengan AN Kamis 30 November 2023).

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (1983) bahwa berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan di perlukan isi kebijakan yang jelas programnya dan tujuan-tujuan yang akan dicapai serta tersedianya sarana yang menjadi penetapan prioritas.

#### **b) Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat**

Pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan aktor-aktor yang terlibat langsung yang mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Karena apabila kekurangan informasi

pada aktor objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak mengetahui berbagai kemungkinan mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pemerintah dan digunakan untuk apa atas kewajiban yang mereka penuhi. Kekurangan informasi akan menimbulkan kekebun mengenai kebijakan bagi objek kebijakan dalam melaksanakan isi kebijakan. Jadi informasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM ditentukan oleh aktor yang berperan penting dalam proses kerja sama antar pihak-pihak yang terkait seperti, pimpinan Kampus, fakultas, prodi, dosen, dan mahasiswa. Keterlibatan aktor-aktor merupakan suatu proses penting dalam pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM untuk mempermudah adanya keterbukaan data dan informasi kepada dosen dan mahasiswa mengenai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Jika melihat peran aktor-aktor dalam proses kebijakan MBKM dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM dilibatkan beberapa elemen seperti; Perguruan Tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra. Dari peran elemen ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan MBKM dan tentunya dibutuhkan sinergitas antar elemen dan aktor yang terdapat di

dalamnya. Sehingga para aktor yang terlibat tetap menjalin kerja sama dan koordinasi secara intensif demi kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM. Berdasarkan wawancara dengan ketua LP2AI Unismuh Makassar bapak N.S sebagai berikut:

“Terkait informasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh, yang pertama memberikan informasi tentunya dari pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor kemudian di sampaikan ke Lembaga LP2AI sebagai aktor utama dalam menangani program kegiatan pembelajaran MBKM dan kemudian di sampaikan ke Prodi sebagai penyedia fasilitas bagi mahasiswa, serta mekanisme pelaksanaannya pihak Prodi mendaftarkan ke akun Kampus merdeka. Sehingga keterbukaan informasi sangat terbuka karena bisa di akses secara online.” (Hasil wawancara dengan HS Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat di analisis secara umum bahwa aktor-aktor kebijakan yang terlibat sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan pembelajaran MBKM. Aktor yang terlibat diperlukan langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik sehingga tidak terjadi komunikasi yang tidak jelas.

Penyampain informasi dari aktor akan memudahkan mengetahui kebijakan program kegiatan pembelajaran MBKM yang ada. Jadi informasi dari aktor merupakan satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran karena tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu informasi dibutuhkan yang jelas.

Hal senada juga di sampaikan dengan informan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas PAI Bapak N.S yang mengatakan:

“Jadi yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM sudah di cetuskan dari Kemendikbud dan tentunya yang memiliki kewenangan terkait kebijakan adalah Rektor. Kemudian LP2AI yang akan menangani MBKM berupa kurikulum dan SOP dalam pelaksanaan MBKM. Untuk prodi menjadi pelaksana teknis kebijakan yang sudah di tentukan oleh pimpinan kampus dan bisa di akses secara online terkait program MBKM.”.(Hasil wawancara dengan HS Kamis 29 November 2023).

Hal serupa dari hasil wawancara informan dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Terkait mengenai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM tentunya pihak terkait seperti Rektor sebagai pemberi keputusan dan LP2AI sebagai pembuat pedoman pelaksanaan MBKM serta kami mahasiswa sebagai sasaran utama dalam kegiatan MBKM ”.(Hasil wawancara dengan MI senin 30 November 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program MBKM di Unismuh Makassar tentunya di butuhkan aktor-aktor yang terlibat yang memiliki kewenangan dalam mensupport jalannya program kegiatan pembelajaran MBKM di Unismuh Makassar. Di Unismuh Makassar sendiri memiliki otoritas untuk mendukung program MBKM adalah pimpinan kampus dalam hal ini Rektor, kemudian di teruskan kewenangan ke LP2AI sebagai perumus pedoman-pedoman pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Bukan hanya itu, fakultas dan prodi merupakan juga aktor utama dalam melaksanakan kebijakan, selain itu mahasiswa juga sebagai sasaran utama program MBKM serta mitra yang menjadi tempat untuk memperoleh ilmu

Melalui bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM Perguruan Tinggi diberikan kekuasaan dan otonomi untuk menciptakan proses pembelajaran fleksibel demi terciptanya pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai kebutuhan mahasiswa.

#### **c) Dukungan kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan akan sulit jika pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan. Sehingga dukungan kebijakan sangat dibutuhkan dari pimpinan Kampus. Jadi untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan baik saran maupun biaya. Oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan dalam implementasi kebijakan MBKM terutama dalam bentuk kegiatan pembelajaran di Unismuh Makassar dan di perlukan juga dukungan sumber daya finansial yang diberikan oleh pimpinan Unismuh Makassar berupa dana pendampingan program mengenai sosialisasi MBKM dan penyesuaian kurikulum. Dukungan kebijakan sangat penting dalam proses memperoleh sumber daya manusia di mana yang terlibat adalah ketua prodi yang bertugas melakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi bagi mahasiswa yang mengikuti program, dosen

internal yang memberikan konversi SKS serta mitra yang melakukan kerja sama.

Pelaksanaan program-program MBKM di Unismuh Makassar membutuhkan dukungan kebijakan dari berbagai elemen baik itu dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kampus Unismuh maupun fakultas yang kedepannya akan menghasilkan tranformasi belajar, sekalipun memperoleh hasil belajar yang bervariasi tetapi Perguruan Tinggi mampu menciptakan transformasi kompetensi melalui inovasi pembelajaran yang menghubungkan mahasiswa dengan beragam sumber belajar dan pengalaman lapangan. Pengalaman belajar akan lebih bervariasi dan saling mengisi (interkomplemen) dan mengasah (*sharpening*) antara sumber belajar dan pengalaman sehingga dapat mengembangkan minat, gagasan, keterampilan, *mind set*, dan *action set* mahasiswa. Maka dari itu penerapan kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi perlu dimaksimalkan melalui dukungan kebijakan seperti sumber daya manusia, finansial, kurikulum sistem yang diberlakukan Fredrik (2022).

Seperti uraian hasil wawancara sebelumnya, dalam implementasi kebijakan program MBKM tentunya dibutuhkan dukungan kebijakan pihak pelaksana baik itu dari segi sumber daya manusia dan *financial* pada pelaksanaan program MBKM. Dalam sistem penerapan kebijakan MBKM di setiap fakultas

bisa saja berbeda bentuk pelaksanaanya dan bahkan bisa saja sama dan hal ini tergantung dari kebijakan pimpinan masing-masing.

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua LP2AI Unismuh Makassar sebagai berikut;

“Pimpinan sangat mendukung dan mengapresiasi terkait adanya dukungan kebijakan program kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar karena tanpa dukungan dari pimpinan program tidak bisa terlaksana. Dukungan kebijakan berbentuk finansial tentunya kami sangat mendukung dari pimpinan dengan diberikannya dana pendampingan terkait pelaksanaan MBKM walaupun untuk SDM Unismuh sendiri masih minim”.(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketua LP2AI terkait dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran program MBKM diperlukan sumber daya manusia khusus yang menangani program MBKM yang berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia . oleh karena itu melalui program ini, bisa sinkron dengan beberapa penghargaan yang diterima dari pemerintah, hal ini tidak terlepas dari dukungan dari pimpinan maupun stakeholder yang terlibat dalam menjalankan program tersebut.

Hal serupa yang di sampaikan oleh ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dari fakultas PAI bapak H.S sebagai berikut:

“Terkhusus kami dari pimpinan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan adanya kegiatan pembelajaran program MBKM kami sangat mendukung penuh, di tambah juga

pimpinan ikut mendukung sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar”. (Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HS menyatakan bahwa dukungan kebijakan dari pimpinan Kampus sangat didukung dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran program MBKM sehingga dosen dan mahasiswa menyambut baik, terkhusus dosen sebagai pengampuh mata kuliah bisa memberikan kemudahan dalam mengkonversi nilai yang berkaitan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Prodi Agribisnis bapak N.D dari Fakultas Pertanian sebagai berikut:

“Terkait dukungan kebijakan kegiatan pembelajaran di sistem, kita tahu sudah jelas karena ada pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengatur, jadi setiap anggota tim yang terlibat mendapatkan pelatihan atau bimbingan langsung dari LP2AI terkait pembuatan kurikulum MBKM dengan sumber daya manusia tentunya berasal dari dosen-dosen”. (Hasil wawancara dengan N.D Kamis 29 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ND dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dukungan kebijakan langsung dalam pembuatan dan pelatihan kurikulum tentunya memberikan kemudahan bagi Prodi dan Dosen.

Hal serupa yang di sampaikan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat mendukung kebijakan ini, karena melalui kegiatan pembelajaran ada beberapa mahasiswa yang keluar kota di kirim oleh kampus untuk mengikuti

pembelajaran walaupun bantuan secara finansial masih kurang tapi kami tetap mendukung adanya program ini".(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Hal senada yang di sampaikan oleh mahasiswa jurusan

Agribisnis A.N dari Fakultas Pertanian yang mengatkan bahwa:

"Berbicara terkait dukungan kebijakan kegiatan pembelajaran, prodi sudah cepat dan tanggap dalam *support* karena melalui program ini sudah ada beberapa teman kami mengikuti program ini di luar kota, namun terkadang menemui kendala seperti pendanaan baik dari Kemendikbud maupun Kampus".(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 29 November 2023).

Uraian di atas dapat di analisis bahwa dukungan kebijakan dari pimpinan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan program kegiatan pembelajaran MBKM walaupun ada kendala apapun yang dihadapi. tapi adapun manfaat yang di peroleh dalam penerapan kebijakan program MBKM sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak N.S ketua LP2AI Unismuh Makassar sebagai berikut:

"Yah secara garis besar bermanfaat, karena mahasiswa setelah mengikuti program ini, dapat pengalaman, pengetahuan dan wawasan belajar di luar Kampus dan bahkan ada mahasiswa cepat mendapat pekerjaan setelah selesai nanti karena sudah memiliki dasar".(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Hal serupa dari pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan M.I mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariaiah dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

"Kami sangat merasakan manfaatnya, karena selain mempunyai pengalaman di luar kampus juga menambah

wawasan dan pengetahuan yang sama sekali tidak pernah di kami rasakan sebelumnya saat belajar di Kampus Unismuh, bukan hanya itu dengan adanya dukungan kebijakan program ini bisa terlaksana dengan baik".(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas menyatakan bahwa dukungam kebijakan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Prodi dalam pelaksanaan program MBKM karena dapat berjalan dengan baik dan lancar program kebijakan tersebut bahkan begitu besar manfaatnya walaupun terkadang mengalami kendala sedikit.

Jadi berdasarkan urain di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur yang menjadi dukangan kebijakan dalam penerapan kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus unismuh Makassar, hal yang pertama mengenai finansial yang diberikan oleh Pimpinan Kampus untuk dan pendampingan penerapan program dan dukungan kebijakan sumber daya manusia karena merupakan elemen penting dalam mendukung kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan secara strukutur organisasi mulai dari pimpinan Kampus sampai tingkat bawah. Keterlibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan tentunya sangat berperan penting dalam menjalankan kebijakan-kebiajakan yang ada guna memajukan dunia pendidikan Kampus kedepannya.

#### **d) Pembagian potensi**

Adanya pembagian potensi merupakan bentuk kegiatan pemberian wewenang atau tanggung jawab masing-masing

kepada aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran program MBKM. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM tidak lagi terjadi pembagian potensi tugas, delegasi wewenang atau tanggung jawab, koordinasi dan sebagainya tidak seimbang. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan kebijakan maka diperlukan pembagian potensi yang seimbang di mana di dalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, hal ini bertujuan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu peran aktor dalam menyeimbangkan kebijakan program MBKM di setiap fakultas dan Prodi harus bertanggung jawab pada setiap tugas dan fungsinya masing-masing, mulai dari menyusun kriteria persyaratan mahasiswa yang akan penerima program MBKM di setiap fakultas dan Prodi.

Sebagaimana kutipan wawancara bersama bapak N.D selaku Ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian yang mengatakan:

“Kami selaku pimpinan prodi koordinasi langsung dan sosialisasi pada setiap pelaksanaan program MBKM pada stakeholder yang terlibat, hal ini bertujuan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait pelaksanaan program MBKM sehingga disampaikan secara langsung agar ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, dalam memberikan pembekalan ada khusus yang memberikan penjelasan baik dari fakultas maupun prodi”. (Hasil wawancara dengan N.D Senin 11Desember 2023).

Kutipan hasil wawancara di atas dengan informan bapak N.D dapat di analisis bahwa koordinasi sangat penting dilakukan

kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada guna untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting melalui sosialisasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam penerapan program MBKM.

Hal senada juga hasil wawancara dengan Ketua LP2AI Unismuh Makassar bapak N.S yang mengatakan bahwa:

“Kami dari LP2AI memberikan sosialisasi dengan mengundang pimpinan fakultas, prodi dan tim MBKM yang sudah ditentukan oleh Pihak Universitas dan adapun yang menjadi eksekusi atau yang melaksanakan MBKM yaitu dari LP2AI”. (Hasil wawancara dengan NS Senin 11 Desember 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dengan informan bapak NS yang mengatakan bahwa peran aktor dalam memberikan informasi terkait program kegiatan pembelajaran MBKM mengundang kepada setiap fakultas dan prodi untuk di sosialisasikan di mana pihak LP2AI sebagai tim yang akan menyampaikan penjelasan tata cara alur pelaksanaan MBKM.

Hal serupa dari wawancara mendalam kepada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Kami di informasikan secara langsung oleh pimpinan prodi melalui pemberitahuan dengan lisan untuk mengikuti sosialisasi terkait program MBKM yang di adakan oleh pihak LP2AI”. (Hasil wawancara dengan MI Senin 11 Desember 2023)

Sebagaimana juga kutipan wawancara bersama bapak N.S selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan:

“Peran pimpinan memberikan informasi tentang sosialisasi terkait program MBKM merupakan bentuk tanggung jawab bersama guna untuk mendukung program kegiatan pembelajaran MBKM, sehingga di butuhkan koordinasi secara sistematis antar pimpinan mulai dari LP2AI, Fakultas, Prodi, dan mahasiswa”.(Hasil wawancara dengan NS Senin 11 Desember 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, dapat di analisis dan disimpulkan bahwa pembagian potensi program MBKM melalui koordinasi langsung dilakukan secara struktur yaitu melalui LP2AI melakukan pelatihan atau bimbingan mengenai adaptasi kurikulum MBKM kepada Prodi, kemudian Prodi memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai mekanisme pelaksanaan program kegiatan pembelajaran MBKM dari Kemendikbud. Prodi juga melakukan sosialisasi dengan pihak mitra mengenai program MBKM yang akan di laksanakan serta Prodi pun melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait program MBKM.

Adapun yang menjadi bagian dari Program MBKM yaitu;

a) Kampus mengajar

Kampus mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan program ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan menjadi mitra guru dalam melakukan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan di stauan pendidikan dasar dan menengah.

Dengan melaksanakan program ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan; berpikir, analitis, penyelesaian masalah, kepemimpinan, manajemen tim, kreativitas dan inovasi serta komunikasi interpersonal. Selain itu program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan minat dan bakatnya serta pengembangan keterampilan diri baik *hardskill* maupun *softskill*.

b) Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Merupakan program persiapan karier yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang di akui Perguruan Tinggi.

c) Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Negeri

Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Negeri adalah sebuah program mobilitas mahasiswa selama satu semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi di Indonesia sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman.

**Tabel 4.2 Daftar program MBKM Unismuh Makassar langsung dari Kemendikbud**

No	Program	Batch	Jumlah
1	Kampus Mengajar	2021/1	57 orang
		2022/2	96 orang
		2022/3	180 orang
		2023/4	253 orang

2	Magang dan Studi Independen Bersertifikat	2021/1	11 orang
3	Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Negeri	2021/1	64 orang

Sumber: Data dari LP2AI Unismuh Makassar

**Tabel 4.3 Daftar MBKM Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM Unismuh Makassar**

No	Prodi	Program	Mitra	Batch	Jumlah
1	Hukum Ekonomi Syariah	Pertukaran Mahasiswa	Universitas Bosowa	2021/1 2022/2	4 orang 5 orang
		Magang/Praktik Kerja	Advokat Bangsa Indonesia	2021/1	4 orang
			Lazismu	2021/1	5 orang
		kewirausahaan	PT. Surya Pangan Indonesia	2021/1 2022/2 2023/1	4 orang 15 orang 1 orang
		KKN Tematik	Desa	2022/1	5 orang
2	Agribisnis	Magang/ Praktik Kerja	PT. Surya Pangan	2021/1	22 orang
		Pertukaran Mahasiswa	Unismuh Purwekerto	2021/1	3 orang
			Unismuh Sukabumi	2021/1 2023/1	3 orang 5 orang
		KKN Tematik	Desa Bontomanai	2021/1	36 Orang
			Desa Galesong	2021/1	33 orang
		Kewirausahaan	Unismuh Makassar	2021/1 2023/1	3 orang 48 orang

Sumber : Data dari LP2AI Unismuh Makassar

**Tabel 4.4 Daftar jumlah program MBKM dalam bentuk kegiatan pembelajaran di Kampus Unismuh Makassar dari tahun 2021 sampai 2023**

No	BKP	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1	Pertukaran mahasiswa	67 orang	54 orang	90 orang	211 orang
2	Magang	96 orang	90 orang	115 orang	301 orang

3	Kewirausahaan	-	595 orang	217 orang	812 orang
4	KKN Tematik	180 orang	127 orang	163 orang	470 orang
<b>Total</b>					<b>1794 orang</b>

Sumber : Data dari LP2AI Unismuh Makassar

Berdasarkan tabel di atas jumlah program MBKM 4 jenis BKP di Kampus Unismuh Makassar dalam rentang tahun 2021 sampai 2023 mengalami perubahan di setiap tahun. Dari hasil penelitian kami di lapangan bahwa setiap tahun mengalami perubahan kuota dan jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM di sebabkan karena anggaran dari kemendikbudristek yang tidak menetap setiap tahunnya sehingga mengalami perubahan kuota mahasiswa. Jadi pihak kampus hanya mengikuti sesuai anggaran yang ada dengan mencocokkan jumlah kuota mahasiswa yang bisa mengikuti program tersebut.

Adapun yang menjadi persyaratan mahasiswa mengikuti program MBKM sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang aktif program studi D3/D4/S1 di Perguruan Tinggi
- 2) Mahasiswa semester 4 pada saat pelaksanaan program
- 3) Memiliki IPK 3,00
- 4) Data mahasiswa terdaftar di PDDikti

Pembelajaran dalam program MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa,

serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat melalui Program MBKM, dikenal adanya berbagai aktivitas unggulan yang dapat dilakukan di luar kampus, antara lain:

**a) Pertukaran mahasiswa**

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan program Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka yang dilaksanakan dengan mitra yaitu Perguruan Tinggi dalam Negeri maupun luar Negeri dengan pembelajaran secara daring dan luring. Pertukaran mahasiswa dilakukan melalui mekanisme di dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun Perguruan Tinggi yang berbeda.

Salah satu aktivitas populer bagi mahasiswa di luar kampus adalah pertukaran mahasiswa. Mereka dapat mengambil kelas di universitas luar atau dalam Negeri untuk memperoleh pengetahuan dan suasana baru. Namun, semuanya harus sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nilai dan kredit yang diterima dari Universitas luar akan disesuaikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi (Prahani et al., 2020 dalam Hidayatullah, 2021).

Penerapan kebijakan program MBKM selanjutnya adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang kebijakan-kebijakan tentang bentuk kegiatan pembelajaran program pertukaran mahasiswa apa yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana dalam melakukan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan kebijakan MBKM yang berkaitan jenis pertukran mahasiswa yang dijalankan di Unismuh Makassar seperti MBKM dari Kemendikbud. Hal ini dapat di perkuat dari hasil wawancara dengan informan Ketua LP2AI Unismuh Makassar Bapak N.S yang menyatakan:

“Secara umum kebijakan tentang bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM di terima dan di sambut baik oleh pimpinan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kami dari LP2AI yang di berikan tugas untuk membuat pedoman terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan pertukaran mahasiswa MBKM juga menyambut baik program ini. Oleh karena itu sejak di luncurkan program ini tahun 2020 oleh pemerintah, kami selaku penanggungjawab wajib menyampaikan dan mensosialisasikan ke fakultas dan Prodi serta kepada mahasiswa terkait tata cara pelaksanaan MBKM ini”.(Hasil wawancara dengan NS Kamis 25 November 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan yang telah di uraikan bahwa dapat di di peroleh gambaran umum terkait kebijakan pelaksanaan tentang bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM di kampus Unismuh Makassar di terima dengan baik dan bahkan adanya program MBKM ini di sambut dengan baik oleh pimpinan sampai ke tingkat bawah. Hal senada juga yang di perkuat oleh

Kutipan wawancara dengan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak H.S yang mengatakan bahwa:

“Gambaran umum tentang bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM diterima dengan baik di unismuh hal ini di tandai dengan program telah di ikuti banyak mahasiswa dan sejak di luncurkan oleh pemerintah tahun 2020, serta di perkuat terbitnya surat edaran dari rektor tentang kebijakan MBKM di unismuh Makassar sejak itu juga. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM adalah pimpinan universitas, LP2AI, Fakultas, Prodi, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa” (Hasil wawancara dengan NN Kamis 23November 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan yang telah di uraikan, dapat diketahui bahwa gambaran umum pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM di terima dengan baik oleh kampus unismuh Makassar. Dalam program MBKM, adapun yang menjadi aktor dalam pelaksanaan MBKM pertukaran mahasiswa adalah LP2AI, Fakultas, Prodi, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa. Inilah yang menjadi aktor dalam penerapan dan pelaksanaan pertukaran mahasiswa di kampus Unismuh Makassar. Sehingga program MBKM yang diterapkan diterima dengan baik oleh semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Walaupun mengalami kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa tersebut.

Hal sama yang di perkuat oleh kutipan wawancara dengan ketua Prodi Agribisnis Bapak N.D yang mengatakan bahwa:

“Gambaran tentang bentuk kegiatan pembelajaran pertukran mahasiswa MBKM secara garis besar di sambut baik oleh semua pihak yang terlibat dalam program MBKM ini. Hal ini di buktikan dengan di ikutinya program MBKM oleh kampus Unismuh Makassar sejak di luncurkannya oleh pemerintah pada tahun 2020”.(Hasil wawancara dengan ND Kamis 23 November 2023).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa gambaran umum tentang bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa program MBKM di sambut baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBKM tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi perbedaan pendapat terkait aturan dalam penerapannya.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan oleh penulis di temukan di lapangan bahwa pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM di setiap Prodi yang di terapkan semua sama dalam penerapannya. Hal ini juga di perkuat berdasarkan kutipan wawancara dengan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama M.I dari Fakultas PAI sebagai berikut:

“Iya sama saja karena kebijakan tentang pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM dari pimpinan tidak membeda-bedakan dengan Fakultas dan prodi lainnya yang terlibat dalam proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa MBKM sebagaimana keputusan pimpinan Universitas melalui surat keputusan Rektor di tembuskan kepada LP2AI, kemudian di sampaikan kepada setiap fakultas dan prodi”. (Hasil wawancara dengan MI Kamis 23 November 2023).

Hasil kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM yang di terapkan dalam setiap Fakultas dan Prodi semua sama secara umum. Oleh karena itu pertukaran mahasiswa dapat di laksanakan dengan baik apabila jelas tujuannya dan cukup rinci. Jadi kunci pelaksanaan pertukaran mahasiswa adalah mempunyai program yang jelas seperti program MBKM yang di terapkan saat ini.

Hal senada juga yang di dukung oleh wawancara dengan mahasiswa jurusan Agribisnis atas nama A.N dari Fakultas Pertanian sebagai berikut:

“Terkait bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM dari pimpinan Kampus mengenai regulasinya sama saja sistem penerapannya di lapangan, hanya saja dalam mengimplementasiannya mungkin bisa saja berbeda, tapi secara aturan dan programnya sama saja sebagaimana keputusan pimpinan Universitas melalui surat keputusan Rektor di tembuskan kepada LP2AI, kemudian di sampaikan kepada tiap fakultas dan prodi”. (Hasil wawancara dengan AN Kamis 23 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN menyatakan bahwa bentuk kegiatan pembelajaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa MBKM yang di jalankan oleh fakultas dan prodi sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang dirasakan mahasiswa pada saat pembelajaran di kampus walaupun masih ada kendala.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan bapak NS selaku ketua LP2AI Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya adalah masalah pencairan dananya mahasiswa yang lambat dan bahkan lama mengantri juga untuk menunggu dananya keluar dari kementerian padahal dana yang diterima mahasiswa yang mengikuti program ini lumayan membantu karena mahasiswa mendapatkan 1,4 juta rupiah/mahasiswa”. (Hasil wawancara dengan MI Kamis 23 November 2023).

Hal senada yang di ungkapkan informan dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Hal yang menjadi kendala soal dana yang terlambat cair, kemudian soal mengenai konversi nilai yang ada pada dosen yang kadang tidak paham dengan program ini”.(Hasil wawancara dengan AN Kamis 30 November 2023).

Jadi persoalan pelaksanaan pertukaran mahasiswa soal pendanaan akan tetapi tujuan pertukaran mahasiswa untuk membentuk sikap sabar dalam mengikuti prosesnya serta menghargai berbagai kondisi baik dari segi sumber daya manusia maupaun finansial dalam pelaksanaan program MBKM baik di Kampus maupun luar Kampus.

Hal senada yang di ungkapkan informan dosen pembimbing lapangan dari jurusan Agribisnis Syariah atas nama S.R dari Fakultas Pertanian yang mengatakan bahwa:

“Terkadang kami di lapangan jarang mengontrol mahasiswa karena padatnya jadwal mengajar di kampus, terkadang juga kami kurang paham mengenai proses pelaksanaan program ini. Belum lagi keterbatasan SDM dan finansial yang kurang mendukung”. (Hasil wawancara dengan SR Senin 27 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan ibu SR selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) dapat di ketahui bahwa dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa di lapangan bisa dikatakan bahwa peran dosen peming lapangan sangat kurang waktunya untuk mengontrol mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di karenakan jadwalnya sangat padat di kampus.

Pernyataan di atas di perkuat hasil wawancara dengan bapak A.L selaku mitra pertukaran mahasiswa dari Unibos mengatakan bahwa:

“Berharap kerja sama dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa merupakan aplikasi program MBKM yang perlu di apresiasi, sehingga kedepannya juga bisa pertukaran pengajaran bagi dosen kedua belah pihak. Karena kendala sekarang masih kurangnya pertukaran pengajaran dan riset bersama antara mitra kerja sama”. Hasil wawancara dengan AL Senin 27 Mei 2024).

Berdasarkan hasil pemaparan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kedepannya bukan saja kerja sama pertukaran mahasiswa namun pertukaran pengajaran bagi dosen dan riset pun perlu dilakukan bersama hal ini untuk mempererat kerja sama terus-menerus kedepannya.

#### **b) Magang**

Adanya kegiatan magang sebagai mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kondisi dunia kerja secara nyata melalui pengalaman langsung. Hal ini akan memberikan motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Magang di Perguruan Tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplemetasikan teori yang selama ini diperoleh di Kampus ke lapangan. Selain itu dari kegiatan magang mahasiswa bukan saja menambah pengetahuan dan keterampilan namun diharapkan dapat pengalaman yang bermanfaat di dunia kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas PAI bapak H.S sebagai berikut:

“Terkait informasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran magang MBKM di kampus Unismuh, yang pertama memberikan informasi adalah pimpinan Universitas kemudian di sampaikan ke Lembaga LP2AI sebagai aktor

utama dalam menangani program MBKM dan kemudian Prodi yang menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa, serta mekanisme pelaksanaannya pihak Prodi mendaftarkan ke akun kampus merdeka. Sehingga keterbukaan informasi sangat terbuka karena bisa di akses secara online.” (Hasil wawancara dengan HS Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat di analisis secara umum bahwa bentuk pembelajaran magang aktor-aktor yang terlibat sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait terkait proses magang MBKM. Aktor yang terlibat diperlukan langsung mempunyai informasi yang untuk dapat memainkan perannya dengan baik sehingga tidak terjadi komunikasi yang tidak jelas.

Memberikan informasi yang jelas akan memudahkan mengetahui kebijakan-kebijakan program bentuk kegiatan pembelajaran magang MBKM yang ada. Jadi informasi dari aktor merupakan satu unsur yang penting dalam pelaksanaan magang, karena tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu informasi di butuhkan yang jelas sebagaimana yang diperkuat dari hasil wawancara dengan informan Ketua LP2AI Unismuh Makassar Bapak N.S yang menyatakan:

“Sebagai bentuk informasi kami melakukan sosialisasi di semua fakultas yang ada di unismuh Makassar, tentang program kegiatan pembelajaran magang kemudian di lanjutkan juga di setiap prodi dan bahkan ada mahasiswa yang duluan lebih tahu dari pada kami di LP2AI karena mudahnya di akses di media online” Hasil wawancara dengan HS Kamis 29 November 2023).

Hal serupa dari hasil wawancara informan dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama R.M dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Saya pribadi mendapatkan informasi langsung dari senior-senior terkait program magang MBKM ini, belakangan baru saya dapat informasi dari pihak kampus secara langsung dan bahkan pihak Prodi hanya menyampaikannya secara lisan, belakangan baru di sosialisasikan”.(Hasil wawancara dengan RM senin 30 November 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi dari aktor yang terlibat masih kurang komprehensif sosialisasinya di setiap Prodi terkait program magang MBKM yang di luncurkan oleh pemerintah. Penyampain informasi yang dilakukan oleh aktor sangat penting untuk proses pelaksanaan setiap program yang akan di jalankan. Oleh karena itu informasi juga merupakan unsur penting dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan.

Sesuai wawancara dengan informan dari mahasiswa jurusan Agribisnis atas nama W.Y dari Fakultas Pertanian yang mengatakan bahwa:

“ Pelaksanaan magang telah di informasikan kepada kami oleh pihak Prodi bahwa yang akan mengikuti magang harus memiliki IPK 2,75 ke atas sebagai persyaratan mengikuti magang dengan mitra yang sudah di tentukan oleh kampus”. (Hasil wawancara dengan WY senin 30 November 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa program magang tidak semua mahasiswa bisa mengikuti proses magang di luar kampus. Proses magang juga

harus memiliki mitra di luar yang sudah di ajak kerja sama oleh pihak kampus untuk di tempati sebagai praktek kerja lapangan.

Hal serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan informan HS dari Dosen Pembimbing Lapangan yang mengatakan:

“Selama pelaksanaan magang kami selaku dosen pembimbing lapangan yang di amanahkan untuk membimbing mahasiswa di lapangan di sampaikan kepada seluruh mahasiswa agar betul-betul mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, karena tidak semua mahasiswa bisa ikut program ini dikarenakan beberapa kriteria yang menjadi kendala”. ”.(Hasil wawancara dengan HS senin 27 Mei 2024).

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa peran dosen pembimbing lapangan dalam bentuk kegiatan magang betul-betul di menjalankan tugasnya sebagai pembimbing lapangan demi untuk memastikan mengikuti seluruh kegiatan yang ada.

### c) Kegiatan Wirausaha

Bentuk peningkatan kemampuan dan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha, beberapa kegiatan dan perkuliahan harus diterapkan walaupun ada mata kuliah kewirausahaan di beberapa program studi, namun banyak mahasiswa yang belum memiliki minat dan tidak terkelola dengan baik dalam bidang ini, padahal peluang sukses cukup tinggi. Oleh karena itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan atau dapat diakui dan disetarakan dengan mata kuliah tertentu. Berdasarkan survei dari *Global Entrepreneur shipIndex* di tahun 2018 ditemukan

data dan fakta bahwa orang Indonesia yang menjadi wirausaha hanya sekitar 21% saja. Sedangkan survei yang dilakukan kepada generasi milenial di Indonesia ditemukan bahwa minat milenial untuk menjadi wirausaha cukup tinggi yaitu sekitar 69,1%. Hal ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan oleh negara. Dengan kegiatan wirausaha diharapkan potensi tersebut dapat dimanfaatkan.

Seperti uraian hasil wawancara sebelumnya, dalam implementasi kebijakan program MBKM tentunya dibutuhkan dukungan dari pihak pelaksana baik itu dari segi sumber daya manusia dan *financial* pada pelaksanaan program kewirausahaan MBKM. Dalam sistem penerapan kebijakan MBKM di setiap fakultas bisa saja berbeda bentuk pelaksanaannya dan bahkan bisa saja sama dan hal ini tergantung dari kebijakan pimpinan masing-masing.

Sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua LP2AI Unismuh Makassar sebagai berikut;

“Pimpinan sangat mendukung dan mengapresiasi terkait program MBKM salah satunya bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan bahkan kita dari dulu mendapatkan beberapa penghargaan atau *reward* dari pemerintah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar program ini atas dasar dedikasi yang tinggi dari pimpinan sampai fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa. (Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa dukungan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran program kewirausahaan MBKM mendapat dukungan

dan apresiasi dari semua stakeholder yang terlibat. Bahkan melalui program ini, secara umum sudah beberapa penghargaan yang di terima dari pemerintah, hal ini tidak terlepas dari dukungan dari pimpinan maupun stakeholder yang terlibat dalam menjalankan program tersebut.

Hal serupa yang di sampaikan oleh ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dari fakultas PAI bapak H.S sebagai berikut:

“Terkhusus kami dari pimpinan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan adanya bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan program MBKM kami sangat mendukung secara penuh, karena hadirnya kebijakan MBKM ini, didukung langsung oleh pimpinan Kampus juga sehingga kegiatan ini di sambut baik dari kalangan dosen dan mahasiswa”. (Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HS menyatakan bahwa dukungan dari pimpinan kampus sangat didukung dalam pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang merupakan salah satu program MBKM sehingga dosen dan mahasiswa menyambut baik, terkhusus dosen sebagai pengampuh mata kuliah bisa memberikan kemudahan memberikan bimbingan usaha terkait kewirausahaan.

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh ketua prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian sebagai berikut:

“Terkait dukungan dalam bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan di sistem saya kira kita tahu sudah jelas karena pada Standar Operasional Prosedur sudah diatur, hampir pada fakultas mendapatkan pelatihan atau bimbingan langsung dari LP2AI terkait pembuatan kurikulum MBKM dengan sumber daya manusia tentunya berasal dari dosen-dosen”. (Hasil wawancara dengan N.S Kamis 29 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ND dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dukungan langsung dalam bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan serta pembuatan kurikulum tentunya memberikan kemudahan bagi Prodi dan Dosen dalam melakukan konversi nilai.

Hal serupa yang di sampaikan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah U.R dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat mendukung kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini, karena melalui kegiatan wirausaha mendapatkan bimbingan usaha untuk mengurangi pengangguran kedepan karena ingin menjadi pengusaha setelah lulus kuliah dan tidak lagi bergantung jadi ASN ke depannya.”.(Hasil wawancara dengan UR Kamis 30 November 2023).

Hal senada yang di sampaikan oleh mahasiswa jurusan Agribisnis FF dari Fakultas Pertanian yang mengatakan bahwa:

“Berbicara terkait dukungan kegiatan pembelajaran kewirausahaan, prodi di fakultas sudah cepat dalam *support* bahkan lebih tanggap dalam memberikan solusi dari kendala yang kami hadapi saat memulai kegiatan di lapangan sehingga kami merasa terbantu dalam belajar tentang soal wirausaha”.(Hasil wawancara dengan F.F Kamis 29 November 2023).

Uraian di atas dapat di analisis bahwa dukungan kegiatan pembelajaran kewirausahaan dari pimpinan merupakan kunci utama dalam mengembangkan wirausaha kedepannya setelah lulus dan adapun manfaat yang di peroleh dalam penerapan kegiatan pembelajaran kewirausahaan program MBKM sebagaimana wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak N.S selaku ketua LP2AI Unismuh Makassar sebagai berikut:

“Yah sangat besar manfaatnya, karena mahasiswa setelah mengikuti program ini dapat mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan wawasan belajar tentang wirausaha dan bahkan mahasiswa bisa menjadi pengusaha setelah selesai nanti karena sudah memiliki dasar”.(Hasil wawancara dengan N.S Kamis 30 November 2023).

Hal serupa dari pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan IF mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariaiah dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Kami sangat merasakan manfaatnya, karena selain mempunyai pengalaman tentang wirausaha juga menambah wawasan dan pengetahuan yang sama sekali tidak pernah di dapatkan sebelumnya saat belajar kampus unismuh, bukan hanya itu dengan adanya program ini kami bisa meningkatkan kompetensi *soft skill* maupun *hard skill*, sehingga lebih siap nanti terjun di dunia kerja”.(Hasil wawancara dengan I.F Kamis 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas menyatakan bahwa dukungam kegiatan pembelajaran kewirausahaan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Prodi dalam pelaksanaan program kewirausahaan MBKM karena dapat berjalan dengan baik dan lancar program tersebut bahkan begitu besar manfaatnya walaupun terkadang mengalami kendala sedikit.

Jadi berdasarkan urain di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur yang menjadi dukangan kegiatan pembelajaran kewirausahaan dalam penerapan kewirausahaann MBKM di Kampus unismuh Makassar. Pimpinan Kampus merupakan elemen penting dalam mendukung kebijakan yang ada sebagaimana yang telah di tetapkan secara struktur organisasi mulai dari pimpinan Kampus sampai tingkat bawah. Keterlibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan

pembelajaran kewirausahaan tentunya sangat berperan penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada guna memajukan dunia pendidikan Kampus.

#### d) Membangun Desa/ KKN Tematik

Kerja Kuliah Nyata (KKN) umumnya merupakan mata kuliah yang harus ditempuh. KKN tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya mempertajam *soft skill*, kerja sama, dan *leadership* dalam ikut membangun desa, KKN ini juga bisa digunakan untuk penelitian yang relevan dengan prodinya dan hasilnya disetarakan dengan tugas akhir. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengalaman langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang selama ini di peroleh.

Sebagaimana kutipan wawancara bersama bapak N.D selaku Ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian yang mengatakan:

“Kami melakukan koordinasi langsung dan sosialisasi pada setiap stakeholder yang terlibat sebelum pelaksanaan KKN Tematik, hal ini bertujuan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait pelaksanaan program nanti di lapangan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan disampaikan secara langsung agar betul-betul ikut terjun langsung di tengah-tengah masyarakat”. (Hasil wawancara dengan MI Senin 11Desember 2023).

Kutipan hasil wawancara di atas dengan informan bapak N.S dapat di analisis bahwa koordinasi sangat penting dilakukan kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik guna untuk memberikan pengabdian tridarma Perguruan Tinggi

dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam penerapan program tersebut.

Hal senada juga hasil wawancara dengan Ketua LP2AI Unismuh Makassar bapak N.S yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan sosialisasi dengan mengundang pimpinan fakultas, prodi dan tim MBKM yang sudah di tentukan oleh Pihak Universitas dan yang menjadi penyelenggara atau yang melaksanakan KKN Tematik MBKM yaitu LP2AI”. (Hasil wawancara dengan NS Senin 11 Desember 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dengan informan bapak NS yang mengatakan bahwa peran aktor dalam memberikan informasi terkait kegiatan pembelajaran KKN Tematik mengundang kepada setiap fakultas dan prodi untuk di sosialisasikan dimana pihak LP2A sebagai tim yang akan menyampaikan tata cara pelaksanaan program pembelajaran KKN Tematik.

Hal serupa dari wawancara mendalam kepada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah M.I dari Fakultas PAI yang mengatakan bahwa:

“Kami di informasikan secara langsung oleh pimpinan prodi untuk mengikuti sosialisasi terkait program KKN Tematik MBKM yang di adakan oleh LP2AI”. (Hasil wawancara dengan MI Senin 11 Desember 2023)

Sebagaimana juga kutipan wawancara bersama bapak N.S selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan:

“ Peran pimpinan memberikan sosialisasi terkait program KKN Tematik MBKM merupakan tanggung jawab bersama guna untuk mendukung program MBKM sehingga dibutuhkan koordinasi secara struktur antar pimpinan mulai dari LP2AI, Fakultas, Prodi, dan mahasiswa”.(Hasil wawancara dengan NS Senin 11 Desember 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, dapat di analisis dan disimpulkan bahwa program kegiatan pembelajaran KKN Tematik MBKM melalui koordinasi langsung dilakukan secara struktur yaitu melalui LP2AI melakukan pelatihan atau bimbingan mengenai adaptasi kurikulum MBKM kepada Prodi, kemudian Prodi memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai mekanisme pelaksanaan program pembelajaran KKN Tematik MBKM dari Kemendikbud. Prodi juga melakukan sosialisasi dengan pihak mitra mengenai program MBKM yang akan di laksanakan serta Prodi pun melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait program MBKM.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran yaitu; Pertukaran Mahasiswa, Magang, Kegiatan Wirausaha, dan KKN Tematik sehingga implementasi kebijakan MBKM dapat diketahui manfaatnya dan berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan maka diperlukan syarat-syarat yang mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu:

## **2. Kendala dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar**

Ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam implementasi program MBKM berdasarkan hasil riset dalam bentuk artikel. Kendala yang sering terjadi mayoritas yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa. Sedangkan untuk mitra belum terlihat secara signifikan kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan program MBKM melibatkan mitra perusahaan untuk kegiatan magang, kewirausahaan dan Studi Independen, mitra penelitian untuk kegiatan penelitian serta lembaga pemerintah untuk kegiatan proyek kemanusiaan, magang ataupun lainnya. Mitra yang terlibat dalam kegiatan MBKM diharuskan mendaftar pada sebuah *platform* yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mitra yang mendaftar termasuk mitra yang dalam kategori pemerintah, perusahaan, sekolah maupun Perguruan Tinggi. Mitra ini akan mengikuti proses seleksi, bagi yang memenuhi persyaratan akan lolos. Dalam kajian hasil penelitian, belum ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM ini diantaranya:

- a) Proses adaptasi kurikulum dengan program MBKM.
- b) Masih sedikitnya mitra dalam kegiatan studi independen dan magang serta terbatasnya mitra MBKM Kewirausahaan
- c) Sedikitnya waktu yang tersedia bagi dosen untuk mengikuti kegiatan MBKM karena memiliki jadwal yang padat.
- d) Program Studi kesulitan dalam melakukan rekognisi jumlah sks.
- e) Adanya penetapan kuota pada program MBKM.
- f) Pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan

Khususnya di Kampus Unismuh Makassar Pelaksanaan Kebijakan MBKM tentunya tidak berjalan mulus tanpa kendala. Kendala yang dihadapi tidak hanya program studi saja sebagai pihak penyelenggara, melainkan juga dihadapi oleh pelaksana yaitu mahasiswa dan dosen serta pihak mitra baik mitra lembaga

pemerintah maupun mitra dunia usaha dan industri. Kendala dalam pelaksanaan program MBKM beraneka ragam jenisnya, jika dilihat setiap Perguruan Tinggi atau Program Studi, dilihat dari masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Dalam pembahasan ini akan diuraikan kendala yang timbul dalam implementasi program MBKM di Unismuh Makassar di tinjau dari beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yaitu;

**a) Pertukaran Mahasiswa.**

Salah satu aktivitas populer bagi mahasiswa di luar Kampus adalah pertukaran mahasiswa. Mereka dapat mengambil kelas di Universitas luar atau dalam Negeri untuk memperoleh pengetahuan dan suasana baru. Namun, semuanya harus sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nilai dan kredit yang diterima dari Universitas luar akan disesuaikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi (Prahani et al., 2020 dalam Hidayatullah, 2021).

Kita bisa berkaca dari data di peroleh dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah bahwa setiap tahun mengalami kenaikan minat mahasiswa mengikuti program MBKM khususnya pertukaran mahasiswa, Akan tetapi pertukaran mahasiswa terdapat di dalamnya kendala seperti hasil wawancara informan bapak H.N ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengatakan:

“Ada beberapa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa yang di alami oleh pihak prodi dan dosen, seperti pembelajaran di kelas kurang efektif karena terkadang ada pengajar hanya memberikan materi kepada

mahasiswa tanpa penjelasan”. (Hasil wawancara dengan HN Selasa, 19 Desember 2023).

Hal yang sama yang di katakan oleh ketua Jurusan Agroteknologi ibu O.D dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengatakan:

“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa yang terjadi di Prodi dan dosen serta staf yaitu mengenai jadwal pembelajaran yang begitu padat sehingga terkadang bertabrakan jadwal mengajar di kelas dan di lapangan. Sehingga terkadang juga hanya memberikan materi tanpa penjelasan yang detail kepada mahasiswa”.(Hasil wawancara dengan OD Selasa, 28 Mei 2024).

Begitu pula yang dikatakan oleh mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa :

“Adapun yang menjadi kendala yaitu biasa hanya menerima materi dari dosen tanpa ada penjelasan, hal ini karena mungkin dosen masih kurang paham mengenai program ini. (Hasil wawancara dengan MI Selasa, 19 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan informan yang telah diuraikan di atas, dapat di analisis bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka tidak begitu berjalan mulus, karena masih adanya kendala. Salah satu kendalanya di dalam pertukaran mahasiswa yaitu mengenai pembelajaran yang masih kurang efektif. Oleh karena itu para dosen yang terlibat sangat penting memahami program ini kedepannya.

Begitupun yang dikatakan oleh F.R mahasiswa dari jurusan Agribisnis yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor kendalanya yang kami rasakan yaitu terkadang jaringan internet kadang tidak stabil sehingga

adaptasi kurikulum yang membutuhkan waktu yang cukup lama mengenai konversi sks sehingga kesulitan mendapatkan nilai dengan cepat". (Hasil wawancara dengan AN selasa, 19 Desember 2023).

Berdasarkan uraian wawancara yang di sampaikan oleh FR dapat diketahui bahwa jaringan internet terkadang tidak stabil dan adaptasi kurikulum yang lamabat sehingga kendala menyebabkan terkadang nilai lambat keluar yang ada di sistem akademik tidak bersamaan, hal ini di karenakan juga faktor hasil belajar yang diikuti mahasiswa program MBKM perlu di sinkronkan dengan mata mata kuliah yang sesuai.

**b) Magang/Praktik.**

Adanya kegiatan magang sebagai mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kondisi dunia kerja secara nyata melalui pengalaman langsung. Hal ini akan memberikan motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan memperkuat keterampilan mereka di dunia kerja. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program magang (Cakrawala & Hakim, 2021; Nicolas Cen, 2021; Hayati, 2021; Putra, Qomariyah & Aditya, 2021; Takdir et al., 2021), yaitu; Rendahnya keterlibatan dosen dalam program magang dan kurangnya sosialisasi program magang;

Seperti hasil dalam wawancara dengan A.N mahasiswa dari Prodi Agribisnis yang mengatakan bahwa kendala penyelenggaraan program magang MBKM:

“Mengenai kurangnya sosialisasi soal persyaratan nilai yang harus di penuhi, seperti nilai IPK harus diatas 2.75 dan harus membuat proposal juga”.(Hasil wawancara dengan AN Selasa 19 Desember 2023).

Hal di atas juga di perkuat oleh bapak N.D selaku Ketua

Jurusan Agribisnis yang mengatakan :

“Bahwa salah satu syarat yang harus diperoleh mahasiswa adalah minimal nilai IPK harus di atas 2,75 sehingga terkadang ada mahasiswa yang tidak mencapai target, sehingga banyak mahasiswa yang tidak ikut karena tidak memenuhi syarat” “. (Hasil wawancara dengan ND Selasa 19 Desember 2023).

Hal senada yang dikatakan mahasiswa M.I Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah yang mengatakan :

“Bukan hanya persoalan nilai tapi terkadang tidak ada mentor yang membantu untuk memberikan petunjuk dalam praktek pekerjaan di tempat instansi kami magang”. (Hasil wawancara dengan MI Selasa, 19 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara informan M.I di atas dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi saat mengikuti magang bukan hanya persoalan nilai namun juga mentor di lapangan yang terkadang kurang memonitoring kami selama mengikuti magang.

### c) Kegiatan Wirausaha.

Berdasarkan survei dari Global *Entrepreneur shipIndex* di tahun 2018 ditemukan data dan fakta bahwa orang Indonesia yang menjadi wirausaha hanya sekitar 21% saja. Sedangkan survei yang dilakukan kepada generasi milenial di Indonesia ditemukan bahwa minat milenial untuk menjadi wirausaha cukup tinggi yaitu sekitar 69,1%. Hal ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan oleh Negara. Dengan kegiatan wirausaha diharapkan potensi

tersebut dapat dimanfaatkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini (Setyawati et al., 2021; Fuadi, 2021; Sintiwati et al., 2022), tidak semua mahasiswa dan dosen di program studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki jiwa wirausaha, sehingga minat pada kegiatan ini masih rendah.

Sebenarnya di beberapa Perguruan Tinggi sudah memasukkan kewirausahaan dalam kurikulum serta pembuatan ikubator bisnis, namun belum meningkatkan jiwa wirausaha mahasiswa dan dosen. Akibatnya mahasiswa dan dosen di program studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki jiwa wirausaha belum terlihat. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara salah satu dosen Agribisnis yang mengatakan bahwa:

“Yang menjadi problem Kegiatan wirausaha ini tidak terlepas minat mahasiswa, karena ada beberapa mahasiswa jiwa usahanya belum ada serta diikuti lagi permasalahan sumber dana dari kementerian yang kadang lambat dicairkan sehingga terkadang mahasiswa harus menunggu.”. (Hasil wawancara dengan ND selasa, 12 Desember 2023).

Hal sama juga yang dikemukakan oleh mahasiswa F.R yang mengatakan bahwa :

“Terkadang kami harus menunggu dana dari Kampus dan masih minimnya mahasiswa yang mengambil program ini karena jiwa wirausahanya belum ada karena hanya bergantung mau jadi PNS bukan pengusaha”. (Hasil wawancara dengan FR Kamis, 21Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan wirausaha yang di programkan kampus masih memiliki kendala dari segi finansial dan jiwa usahanya masih kurang. Padahal hadirnya program kegiatan

wirausaha yang diselenggarakan oleh pihak Kampus membantu para mahasiswa memiliki jiwa pengusaha. Namun tidak semua mahasiswa dan dosen di program studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki jiwa wirausaha. Oleh karena itu kedepannya program wirausaha harus siap di kembangkan untuk menjadi program unggulan semua Kampus yang terlibat dalam program MBKM.

**d) KKN tematik.**

Kerja Kuliah Nyata (KKN) umumnya merupakan mata kuliah yang harus ditempuh. KKN tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya mempertajam *soft skill*, kerja sama, dan *leadership* dalam ikut membangun desa, KKN ini juga bisa digunakan untuk penelitian yang relevan dengan prodinya dan hasilnya disetarakan dengan tugas akhir.

Akan tetapi selama pelaksanaan KKN Tematik ada saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program ini (Hermanto, Kusnanto & Fadhillah, 2021; Rodiyah, 2021; Mudrikah et al., 2022) terkait dengan proses adaptasi terhadap paradigma lama ke baru, kesulitan pendanaan dari desa, kesulitan logistik serta akomodasi mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

Kegiatan dalam pelaksanaan KKN ini tidak serta merta berjalan lancar seperti kutipan wawancara dengan Mahasiswa MI dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan:

“Salah satu tantangan yang kami hadapi selama mengikuti KKN seperti, keterbatasan sumber daya, baik dari segi *financial* maupun fasilitas dan bahkan keterbatasan

akses".(Hasil wawancara dengan MI Kamis, 21 Desember 2023)

Begitupun yang dikatakan dari mahasiswa A.N jurusan Prodi Agribisnis yang menyatakan bahwa:

"Mengenai kesulitan bantuan logistik akibat akses infrastruktur masih banyak jalan yang sulit di lalui dan bahkan yang lebih parah lagi akses komunikasi sulit di jangkau".(Hasil wawancara dengan AN Kamis, 21Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik masih menemui beberapa kendala. Dalam pelaksanaan KKN Tematik masih banyak persoalan yang di hadapi. Jadi dengan adanya berbagai masalah yang terjadi di lapangan menjadi bahan evaluasi pihak kampus dalam program KKN Tematik kedepannya.

Program MBKM yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan pembelajaran membawa dampak dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Program MBKM memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar berbagai keilmuan melalui hak belajar tiga semester di luar Program Studi. Hal ini berdampak kepada Perguruan Tinggi melalui program studi untuk menyesuaikan kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa dalam program MBKM.

Hasil penelitian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kelebihan program MBKM yaitu; 1) Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, 2) Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, 3) Memberikan wadah kepada

mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, dan 4) Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Sedangkan kekurangan Program MBKM yaitu; 1) Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, dan 2) Persiapan SDM yang belum terstruktur serta pencairan dana yang lambat.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar**

Pembahasan dari hasil penelitian implementasi kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM dan kendala dalam implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menggunakan teori dari Hoogerwerf (1983:163) karena dari pelaksanaan kebijakan di perlukan 4 (empat) syarat-syarat tersebut untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu;

##### **a) Isi kebijakan**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Prodi yang ada di Unismuh Makassar mengenai konversi SKS menunjukkan sistem konversi SKS untuk MBKM bantuan dari kemendikbud merupakan program yang dijalankan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Kebijakan kedua, beberapa prodi

belum bisa menerapkan secara *full* 20 SKS, hal ini dikarenakan capaian belajar untuk mata kuliah wajib tidak terpenuhi ketika mahasiswa mengikuti program MBKM sehingga dalam kebijakannya mahasiswa tetap mengikuti program MBKM sembari mengikuti kelas mata kuliah wajib agar capaian belajar yang diharapkan dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Menurut dalam teori model Warwic mengatakan bahwa pada Implementasi kebijakan terdapat faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu, kemampuan organisasi, Kemampuan melaksanakan tugas- tugas yang seharusnya, seperti yang sudah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga (3) unsur utama yaitu kemampuan teknis, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang bekerja dalam bidang dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait serta meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan SOP (Kadji, 2015). Dalam implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar, pihak LP2AI memberikan kebebasan bagi setiap prodi mengenai hal konversi SKS sehingga dalam kebijakan konversi SKS bagi mahasiswa yang mengikuti program akan menghasilkan kebijakan yang berbeda-beda setiap Prodi.

Selain itu, melalui Kemendikbud langsung, pelaksanaan MBKM di Unismuh Makassar juga dapat dilaksanakan melalui bantuan program studi yang menerapkan kerja sama kurikulum merdeka belajar Kampus Merdeka. Setiap Prodi memiliki

kewenangan untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang di mana dalam pelaksanaannya seperti membangun hubungan dengan mitra, membuat buku panduan/pedoman, seleksi mahasiswa, monitoring, evaluasi hingga konversi nilai dilakukan secara mandiri oleh Prodi. Melalui kewenangan ini tentunya setiap Prodi dapat melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang linear dengan jurusan, yang dimana kebijakan mengenai program yang dijalankan serta mitra yang dipilih tentunya berbeda-beda.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikemukakan oleh Kemendikbud mengenai konversi 20 SKS belum sepenuhnya dilakukan secara *full* sebanyak 20 SKS oleh pihak pelaksana MBKM di Unismuh Makassar hal ini karena mempertimbangkan lingkungan kebijakan eksternal yang dimana pencapaian hasil belajar mahasiswa harus maksimal yang dimana sebagian capaian belajarnya belum bisa terpenuhi melalui program. Setiap Prodi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang linear dengan jurusannya yang di mana semua mekanisme pendaftaran, administrasi, hingga MoU/SPK dengan pihak mitra ditangani sendiri oleh prodi yang bersangkutan.

#### **b) Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang di sampaikan oleh aktor-aktor yang terlibat sangat penting untuk di ketahui secara jelas dan terang terkait pelaksanaan suatu

kebijakan diberikan oleh pimpinan ke pihak LP2AI, dimana LP2AI kemudian melakukan sosialisasi ke setiap Fakultas dan Prodi, kemudian Prodi melakukan sosialisasi ke dosen dan mahasiswa tentang pelaksanaan MBKM di kampus Unismuh Makassar.

Pelaksanaan MBKM memerlukan peranan dari berbagai pihak terkait diantaranya pihak Perguruan Tinggi, mahasiswa, Dosen, dan mitra sehingga memperlihatkan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kekurangan informasi pada aktor objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak mengetahui berbagai kemungkinan mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pemerintah dan digunakan untuk apa atas kewajiban yang mereka penuhi. Kekurangan informasi mudah menimbulkan keaburan mengenai kebijakan bagi objek kebijakan dalam melaksanakan isi kebijakan.

Jadi informasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan penyampaian informasi dalam melaksanakan kebijakan harus jelas. Sehingga Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak mahasiswa yang dapat mengikuti program MBKM sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Prodi, serta membuat dokumen MoU dengan mitra (Musthafa & Meliani, 2021: 89).

Jadi dalam implementasi kebijakan tentunya tidak hanya berkaitan dengan sasaran kelompok tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dalam hal ini tentunya terdapat informasi dari aktor yang terlibat serta pihak-pihak lain. Hal ini tercantum dalam implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang di mana informasi dari aktor yang terlibat disampaikan secara jelas dimulai dengan adanya surat keputusan dari Rektor yang diteruskan ke LP2AI. Kemudian LP2AI melakukan sosialisasi penerapan kurikulum MBKM, yang selanjutnya Prodi melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa yang di mana dalam hal ini sesuai dengan teori Model George Edwards III yang mengatkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi informasi memegang peranan penting karena pelaksanaan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dari Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor cepat dan konsisten.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari aktor yang terlibat adalah aktor-aktor yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik melalui kewenangan yang dimiliki sebab informasi merupakan

salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan informasi dalam melaksanakan kebijakan harus jelas. Oleh sebab itu dengan melalui informasi dari aktor yang berwenang ini akan bisa menjamin penyampaian secara jelas terkait adanya informasi dengan baik.

Sebagaimana dalam pelaksanaan MBKM di Unismuh Makassar yang di mana sumber informasi dari aktor yang terlibat yang disampaikan melalui surat edaran. Informasi yang dilakukan tentunya perlu secara jelas di sampaikan oleh rektor Unismuh Makassar terhadap LP2AI mengenai penerapan MBKM kemudian pihak LP2AI melakukan koordinasi kepada seluruh prodi mengenai mekanisme pelaksanaan MBKM, kemudian pihak prodi melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan dosen internal mengenai konversi nilai.

Koordinasi yang dilakukan melalui keputusan pemimpin, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja tentunya harus dijadikan sebagai petunjuk yang disusun secara manual agar gerak langkah menjadi satu kesatuan yang sebut sebagai koordinasi melalui pedoman kerja. Sebagaimana halnya dalam penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar yang termuat dalam Buku Pedoman Operasional Baku (POB).

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang terlibat sangat berperan

penting dalam menyampaikan informasi secara jelas dan terang sehingga semua data dan informasi bisa diketahui oleh dosen dengan baik, semua pihak pelaksana yang terkait terlibat langsung, sehingga tidak ada *misunderstanding* dalam pelaksanaan program kedepannya.

### c) Dukungan Kebijakan

Diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan sangat penting didukung oleh pihak pimpinan pelaksana kebijakan program MBKM terutama dukungan segi finansial maupun SDM. Bantuan dana dari pimpinan ke pihak pelaksana dalam hal ini, LP2AI, Fakultas dan Prodi berupa dana pendampingan penerapan program serta dukungan sumber daya manusia. Proses dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan program MBKM bukan hanya di butuhkan dari pimpinan akan tetapi semua stakeholder yang terlibat dalam program tersebut, baik dosen pengajar maupun mitra sebagai agen kerja sama yang memberikan bimbingan di lapangan kepada mahasiswa. Dukungan kebijakan yang digunakan oleh pihak pelaksana dalam penerapan kebijakan program MBKM di Unismuh Makassar tentunya program-program MBKM sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih perlu di maksimalkan karena masih dalam tahap penyesuaian.

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yakni :

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.
- 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya.

Sebagaimana desain dari kebijakan program MBKM yaitu mahasiswa memiliki hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar Perguruan Tinggi sehingga dalam hal ini Unismuh Makassar membutuhkan dukungan kebijakan yang dapat memudahkan penerapan kebijakan program MBKM. Salah satu bentuk dukungan kebijakan dalam penerapan kebijakan program adalah finansial sebagaimana yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen dalam karya Nur (2014) bahwa anggaran biaya merupakan pernyataan program menurut perhitungan rupiah/dollar serta daftar rinci program baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Sebagaimana dalam pelaksanaan program MBKM di Unismuh Makassar berupa dukungan finansial berada di bagian pelaksanaan yaitu adanya bantuan dana yang diberikan oleh Kemendikbud terhadap mahasiswa yang mengikuti program

MBKM langsung dari Kemendikbud. Dana bantuan juga diberikan kepada Prodi yang terpilih untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM melalui program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Berbeda dengan organisasi bisnis yang *core*-nya berfokus pada keuntungan sedangkan *core* bisnis dari pendidikan adalah pengajaran sehingga ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan terampil tentunya dapat ikut mendorong pengelolaan institusi yang baik melalui perencanaan pengarahannya, monitoring serta evaluasi untuk mendukung kegiatan utama pembelajaran. Nasukah (2018). Sebagaimana Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Edward III mengemukakan apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif sehingga sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Oleh sebab itu dukungan sumber daya manusia dalam penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar yang di mana pihak Prodi melakukan sosialisasi mengenai program MBKM terhadap mahasiswa. Kedua dosen-dosen internal yang merupakan dosen pengampu mata kuliah memberikan konversi sks bagi mata kuliah yang berkaitan serta beberapa dosen internal juga berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) agar

dapat melakukan monitoring serta evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM. ketiga pihak mitra yang berperan sebagai tempat menggali potensi bagi mahasiswa yang mengikuti program. Dalam kamus Webster mengartikan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryngout* (menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan program), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sehingga dalam melakukan implementasi kebijakan, sarana atau daya dukung menjadi salah satu faktor dalam pendukung dalam pelaksanaan program Wahab (2008) dalam Elih (2020).

Hal yang sama juga dikemukakan dalam teori model George Edwards III dalam Suprpto (2019) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dibutuhkan staf yang memiliki kesesuaian *skill* dalam melaksanakan tugas, informasi, wewenang serta fasilitas. Hal tersebut sejalan dengan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar baik itu dari segi sumber daya manusia yaitu LP2AI, Prodi, dan dosen internal serta mitra.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan kebijakan berupa sumber daya manusia masih perlu dimaksimalkan lagi. Dukungan dari segi finansial sudah terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan program MBKM di Unismuh Makassar walaupun masih dalam tahap penyesuaian.

#### **d) Pembagian Potensi**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa peran para aktor dalam pelaksanaan pembagian potensi ini antara lain diferensiasi tugas, delegasi wewenang atau tanggung jawab, dan koordinasi. Koordinasi sangat di perlukan oleh pihak pimpinan, baik secara pembagian tanggung jawab masing-masing bidang kerja maupun pembagian tugas masing-masing.

Uraian pembagian potensi kerja dalam menyeimbangkan tugas dan wewenang dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat baik pimpinan kampus maupun bawahan kampus serta mitra seperti mulai dari Rektor, LP2AI, Prodi, Dosen dan mahasiswa serta mitra. Di mana Rektor merupakan pimpinan Perguruan Tinggi yang mengeluarkan surat keputusan mengenai implementasi kebijakan MBKM, kemudian LP2AI terdapat devisi khusus yang menangani kebijakan program MBKM sedangkan pihak Prodi menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM berupa daftar mata kuliah yang bisa di ambil serta menyiapkan dokumen kerja sama antara mitra berupa perjanjian atau MoU. Serta mahasiswa yang menjadi sasaran utama program MBKM dan mitra yang melaksanakan program MBKM sesuai ketentuan dalam MoU/SPK.

Pemahaman yang baik atas koordinasi dalam pembagian potensi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan program-program dengan baik, Van Meter dan Van Hord dalam Subarsono (2005) menjelaskan dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan tentunya tidak hanya berkaitan dengan sasaran kelompok tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dalam hal ini tentunya terdapat koordinasi pembagian potensi antar berbagai pihak. Hal ini termuat dalam implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang dimana koordinasi yang dilakukan secara terstruktur yang dimulai dengan adanya surat keputusan implementasi MBKM kemudian LP2AI melakukan sosialisasi penerapan kurikulum MBKM, yang selanjutnya melakukan sosialisasi terhadap Prodi dan mahasiswa yang dimana dalam hal ini selaras dengan teori Van Meter dan Van Hon yang menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan tentunya dibutuhkan keselarasan antara keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan. sehingga dapat menghasilkan dampak yang diharapkan.

Koordinasi yang dilakukan melalui keputusan pimpinan, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja merupakan salah satu bentuk pembagian potensi tentunya

harus dijadikan sebagai petunjuk yang disusun secara manual agar gerak langkah menjadi satu kesatuan yang di sebut sebagai koordinasi melalui pedoman kerja. Sebagaimana halnya dalam penerapan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar yang termuat dalam Buku Pedoman Operasional Baku (POB).

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode koordinasi dalam pembagian potensi yang digunakan sudah terstruktur dengan baik, semua pihak-pihak pelaksana yang terkait terlibat langsung tidak ada *misunderstanding* dalam pelaksanaan program kedepannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya program MBKM sangat efektif karena dari persentase menghasilkan 26% responden menyatakan bahwa dapat mempermudah capaian lulusan, 44% menambahkan skill tambahan, 72% dapat meningkatkan wawasan, 44% bermanfaat untuk bekal lulus, dan 48% penting menghadapi pasca kampus serta 54% sesuai kebutuhan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu program MBKM masih menjadi salah satu program yang harus tetap di pertahankan dan di lanjutkan dalam dunia kampus. Sehingga kesiapan kerja mahasiswa setelah mengikuti MBKM memiliki kemampuan keterampilan yang mumpuni.

Keberhasilan implementasi MBKM perlu didukung oleh kesiapan stakeholder pendidikan yaitu mahasiswa, dosen dan institusi. Kesiapan institusi dibuktikan dengan adanya adopsi kebijakan MBKM di internal perguruan tinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program MBKM bukan saja efektif dilaksanakan, tetapi memiliki dampak yang luas terhadap stakeholder yang ada seperti dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik.

**e) Dampak bagi mahasiswa**

Dengan adanya program MBKM ini dianggap kegiatan MBKM penting untuk dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan paska kampus dan bersaing di dunia kerja. Namun yang perlu juga di siapakan sebelum mengikuti program mbkm adalah pembekalan secara mendalam dilakukan untuk meningkatkan keberanian mahasiswa dalam menghadapi tantangan baru untuk bersaing di dunia kerja (Clements & Kamau, 2018). Selain itu juga mahasasiwa akan memperoleh;

- 1) Pengetahuan dan pemahaman teori Mahasiswa semakin berkembang Mahasiswa mengenal perspektif yang baru dan lebih terlatih dalam menyelesaikan masalah Mahasiswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasidalam belajar.
- 2) Relasi dan jaringan pertemanan Mahasiswa bertambah. Mahasiswa menjadi lebih adaptif. Mahasiswa menjadi terlatih untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang baru. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan untuk bekerjasama. Mahasiswa menjadi lebih kreatif

**f) Dampak bagi dosen dan tenaga pendidik**

Keterlibatan dosen dalam implementasi program MBKM sangat penting sebagai salah satu aktor utama yang

mempersiapkan proses belajar mengajar. Diketahui bahwa dosen bertugas untuk mengajar yang artinya mempersiapkan materi pengajaran sesuai dengan kebijakan MBKM termasuk di dalamnya adalah penyiapan capaian pembelajaran lulusan dan rencana pembelajaran semester. Tenaga kependidikan juga berperan penting dalam program MBKM sebagai tenaga administrasi yang harus berhubungan dengan pihak industri dan masyarakat, sehingga kemampuan berkomunikasi perlu untuk ditingkatkan. Mengingat pentingnya tugas dosen dan tenaga kependidikan. Jadi dosen berkegiatan di luar kampus dan pemanfaatan hasil kerja dosen yang di peroleh selama berkegiatan di luar kampus. Keterlibatan semua stakeholder menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan implementasi dari suatu program (Rosyida & Tommy, 2011). Keterlibatan dosen dalam implementasi kebijakan MBKM meliputi keterlibatan dalam sosialisasi, pendalaman terhadap pedoman yang telah disusun, keterlibatan dalam penyusunan capaian pembelajaran (*outcome learning*), proses penyetaraan dan pembimbingan pada mahasiswa.

Dengan demikian program MBKM ini layak di lanjutkan karena menjadi tantangan implementasi MBKM kedepannya sehingga Implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dapat dilakukan di internal perguruan tinggi maupun eksternal perguruan tinggi. Tantangan implementasi MBKM menurut mahasiswa, dosen, tendik dan pengelola (program studi, fakultas dan perguruan tinggi), diantaranya adalah

Pertama, Perubahan mendasar pada paradigma Pendidikan. Program merdeka belajar kampus merdeka merupakan salah satu inovasi dibidang Pendidikan. Kebijakan MBKM memberikan peluang pembelajaran secara inventif. Mahasiswa terlibat langsung dalam kondisi nyata. Dosen-dosen wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menilai proses pembelajarannya untuk menstimulus mahasiswa agar menguasai berbagai ilmu guna sehingga lebih siap dalam memasuki dunia kerja (Alatas, 2020).

## **2. Kendala dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar**

Hasil pembahasan dari penelitian bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program studi dan di luar Program studi meliputi kendala implementasi program MBKM di tinjau dari beberapa kegiatan pembelajaran yaitu;

### **a) Pertukaran mahasiswa**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa program implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar diterima dengan baik dan bahkan disambut baik oleh pimpinan kampus dan lembaga di bawahnya. ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pimpinan baik LP2AI, Fakultas maupun Prodi yang ada di Unismuh Makassar mengenai aturan mulai dari jumlah SKS yang

dapat diambil dari prodi lain dan menentukan serta menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi serta menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang ada untuk memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi lain. Jadi dengan adanya bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa adalah untuk menambah jaringan bagi mahasiswa serta mengenal budaya akademik masing-masing kampus, transfer ilmu pengetahuan tanpa memandang asal mahasiswa tersebut.

Dibalik memiliki tujuan yang baik, implementasi program ini memiliki kendala yaitu pada masa pandemik ini, jaringan internet yang tidak stabil (Putria et al., 2020; Jariyah & Tyastirin, 2020), pembelajaran di kelas yang tidak efektif dikarenakan pengajar hanya memberikan atau melampirkan materi saja tanpa penjelasan

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di Unismuh Makassar juga dapat dilaksanakan melalui bantuan program studi yang menerapkan kerja sama kurikulum merdeka belajar Kampus Merdeka. Setiap Prodi memiliki kewenangan untuk melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang di mana dalam pelaksanaannya melalui kewenangan setiap Prodi untuk dapat melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang sifatnya membangun relasi mahasiswa dengan mahasiswa lain di luar Kampus Unismuh Makassar.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dikemukakan oleh

Kemendikbud mengenai proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa memiliki dampak baik bagi kampus, dosen, maupun mahasiswa.

#### **b) Magang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bentuk kegiatan pembelajaran magang akan memberikan pengalaman yang baru kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan keterampilan maupun *soft skill*. Selain itu, Magang di Perguruan Tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplemetasikan teori yang selama ini diperoleh di Kampus ke lapangan. Selain itu dari kegiatan magang mahasiswa diharapkan dapat pengalaman, pengetahuan serta keterampilan di dunia kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.

Bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, institusi pemerintah, dan kampus. Bentuk kegiatan pembelajaran magang akan menjadi program perguruan tinggi yang melahirkan mahasiswa yang nantinya lulus akan mempunyai keterampilan dan *soft skill*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat juga kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program magang (Cakrawala & Hakim, 2021; Nicolas Cen, 2021; Hayati, 2021; Putra, Qomariyah & Aditya, 2021; Takdir et al., 2021), yaitu; kurangnya sosialisasi program magang, kesulitan mencocokkan rekognisi jumlah sks ke

dalam mata kuliah yang sesuai, rendahnya pemahaman mahasiswa terkait program magang dan banyak program magang yang dibuka, tapi tidak sesuai dengan minat mahasiswa.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemendikbud mengenai proses pelaksanaan magang banyak hal yang di dapat yaitu keterampilan dan *soft skill*, akan tetapi ada juga kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya.

### c) Kewirausahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan akan peningkatan kemampuan dan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha, sehingga dalam perkuliahan harus diterapkan. Walaupun ada mata kuliah kewirausahaan di beberapa program studi, namun banyak mahasiswa yang belum memiliki minat dan tidak terkelola dengan baik dalam bidang ini, padahal peluang sukses cukup tinggi. Oleh karena itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan atau dapat diakui dan disetarakan dengan mata kuliah tertentu.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan merupakan salah satu tempat untuk bisa belajar berwirausaha dalam dunia kampus. Di samping itu pembelajaran kewirausahaan juga bisa membimbing mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam berwirausaha.

#### **d) KKN Tematik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bentuk kegiatan pembelajaran Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Proyek di Desa. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa Unismuh Makassar dapat memiliki pengalaman langsung di masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang selama ini di peroleh. Selain itu mahasiswa juga dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan solusi terbaik. Pelaksanaan program ini dilakukan selama satu hingga dua semester dengan pengakuan konversi SKS sebanyak 20 SKS tiap semesternya. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program ini (Hermanto, Kusnanto & Fadhillah, 2021; Rodiyah, 2021; Mudrikah et al., 2022) terkait dengan proses adaptasi terhadap paradig lama ke baru, kesulitan pendanaan dari desa, kesulitan logistik serta akomodasi mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa bentuk kegiatan pembelajaran KKN Tematik masih menemui titik permasalahan yang harus di kaji dan di evaluasi. Karena masih terdapat beberapa kesulitan yang di dapatkan dalam pelaksanaan di lapangan. Ini menjadi perhatian khusus kedepan bagi pihak kampus terkait pelaksanaan KKN Tematik berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang terkait dengan pelaksanaan program MBKM sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diterapkan dan dilaksanakan, sehingga kegiatan program MBKM berdampak positif bagi dosen dan mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Terkait isi Kebijakan

Adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Prodi yang berkaitan dengan konversi SKS yaitu mengenai kebijakan konversi SKS. Kemudian kebijakan selanjutnya setiap prodi menerapkan bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM yang sesuai dengan bidang keilmuannya yang melalui MBKM dari Kemendikbud.

b) Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di Unismuh Makassar, aktor-aktor yang terlibat betul-betul berperan memberikan informasi sesuai dengan pihak yang terkait yang sesuai buku pedoman MBKM

c) Dukungan bagi kebijakan

Pelaksanaan program-program MBKM di Unismuh Makassar membutuhkan dukungan finansial berupa dana pendampingan program dan sumber daya manusia yaitu Fakultas, Prodi, Dosen internal dan mitra untuk tranformasi belajar.

d) Pembagian potensi

Salah satu cara untuk dapat melaksanakan kebijakan MBKM maka diperlukan pembagian potensi dan koordinasi antar Fakultas dan Prodi dalam menyusun data mahasiswa yang berhak memenuhi syarat dalam melaksanakan program MBKM baik di kampus maupun di perusahaan yang menjadi mitra kampus yang ada di luar kampus.

Secara garis besar, kegiatan MBKM layak untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kedepannya untuk menghadapi persaingan global dunia di bidang pendidikan. Keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan MBKM menjadi kunci dampak dari hasil pembelajaran mengikuti program MBKM yang di luncurkan oleh Kemendibudristek. Program ini perlu diberikan dorongan kepada mahasiswa dengan mensosialisasikan berbagai kegiatan MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Begitu pun bagi dosen karena dosen dan tenaga kependidikan diberikan kebebasan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

2. Adapun Kendala dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan pembelajaran MBKM di Universitas Muhammadiyah Makassar menurut beberapa dosen salah satunya bahwa mahasiswa yang berasal dari prodi yang berbeda sedikit mengalami kendala dalam memahami materi yang diberikan. Tantangan lainnya adalah dikarenakan perkuliahan dilakukan secara daring, mahasiswa inbound terkadang malu untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Sedangkan untuk mitra belum terlihat secara signifikan kendala yang dihadapi. Sehingga program MBKM di Unismuh Makassar tetap berjalan secara optimal dan maksimal, hal ini terlihat dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya sudah mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menyelenggarakan program MBKM. Seperti, Proses konversi SKS, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan sudah dibawah bimbingan dosen. Pelaksanaan Kebijakan MBKM tentunya tidak berjalan mulus tanpa kendala. Kendala yang dihadapi tidak hanya oleh Perguruan tinggi dan program studi saja sebagai pihak penyelenggara, melainkan juga dihadapi oleh pelaksana yaitu mahasiswa dan dosen serta pihak mitra baik mitra lembaga pemerintah maupun mitra dunia usaha dan industri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberi saran dan masukan yang kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat dan perhatian terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai berikut:

1. Disarankan Universitas memberikan kebijakan atau legalitas terkait mata kuliah skripsi dapat dikonversi pada kegiatan MBKM. Para mitra MBKM mempersiapkan program pendampingan atau *mentorship* di awal kegiatan agar memudahkan para mahasiswa untuk beradaptasi. Menyampaikan dan memberikan sosialisasi mengenai program-program MBKM kepada seluruh mahasiswa agar lebih memahami proses syarat perekrutan MBKM dan di tekankan juga kepada mahasiswa mengenai hasil program yang ada untuk di perhatikan karena masih ada beberapa mahasiswa tidak mengetahui tentang adanya program MBKM.
2. Disarankan bagi mahasiswa untuk setidaknya mengikuti satu dari delapan kegiatan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek dalam program MBKM selama berkuliah agar mendapatkan pengalaman serta skills lainnya diluar apa yang sudah didapat selama mengikuti perkuliahan. Sebelum mengikuti kegiatan program MBKM disarankan untuk lebih mengetahui kegiatan program MBKM yang akan diambil sesuai minat dan bakat yang dimiliki.
3. Disarankan bagi Mitra MBKM sebaiknya memahami lebih dalam terkait dengan tujuan dari program Kampus Mengajar, karena sangat penting untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan program ini sehingga pemberdayaan mahasiswa dapat dimanfaatkan secara efektif dan maksimal, serta dapat melaksanakan kerjasama yang baik dan sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Aditya, Rifan. (09 Desember 2022). *Pengertian, Makna, Tujuan dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Suara. Com. diakses pada tanggal 13 Juni 2023 dari <https://www.suara.com>
- Alatas, F. 2020. Tantangan dan Peluang Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. In Muhajir, R. Oktavianthi, U. Mey, Naskin, A. Muflihin, & M. Fatih, *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar*. Jakarta: Akademia Pustaka.
- Arsyad, A. T., & Widuhung, S. D. (2022). Dampak merdeka belajar kampus merdeka terhadap kualitas mahasiswa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(2), 443085.
- Asiah, N. (2021). *Implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (studi pada fakultas ilmu social dan hukum universitas negeri makassar)*(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Bhakti, Y.B., Simorangkir, M.R.R., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022).*Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi*.*Research and development journal of education*,8(20), 783-790
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1-33.<http://dikti.kemendikbud.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy* (13 ed.). (Eric, & Stano, Penyunt.) United State: Pearson Education.
- Fredrik, K. A. (2022). *Rebalancing Kebijakan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. 1(April), 1–14.
- Gusdini, N., Hasibuan, B., & Basriman, I. (2022). Merdeka belajar kampus merdeka sebagai upaya untuk mrningkatkan kualitas lulusan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), 141-149.
- Handoyono, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hoogerwerf, (1983). *Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Erlangga

- Hidayatullah, S. (2021). *Persepsi Mahasiswa Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. *Jurnal Ilmiah Fonema*, 4(1), 79–87. <https://doi.org/10.25139/fn.v4i1.3357>
- Hoogwood, Brian W & Lewis A. Ginn. 1986. *Policy Analysis for the Real World*. PrincetonUniversity Press
- Hudjimartsu, S.A., Prayudyanto, M.N., Permana, S., & Heryansyah, A. (2021). *Peluang dan Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) di Fakultas Teknik dan sains UIKA BOGOR*. *Educate: Jurnal Teknologi pendidikan*, 7(1), 58-70
- Inu Kencana Syafii. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Cetakan ke-3. Jakarta. Bumi Aksara,
- Istiana, R., Awaludin, M. T., & Herawati, D. (2021). *Implementation Of The MBKM Program On 21st Century Competence And Understanding Of SDGs ( Tracer Study on Biology Education Study Program Students , Pakuan University )*. *Journal Of Indonesian Independent Learning (JiiLearn)*, 01(01), 8–11.
- Jumroh dan Pratama, M. Yoga Jusri. (2021) *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Kota Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedaiaksara. [www.gavamedia.net](http://www.gavamedia.net)
- Nofia, N.N. (2020). *Analisis tantangan implementasi kebijakan "merdeka belajar kampus merdeka" pada perguruan tinggi islam negeri di indonesia*. *PRODU: Prokurasi edukasi jurnal manajemen pendidikan islam*, 1(20)
- Marzali, A. *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012).Indrati, M. F. (2011). *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-6. Jakarta: Kanisius.
- Maulana, A., Bahar, Herwina, Nuraeni, Ismah, & Rosiyanti, H. (2022). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Survey SPADA di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022)*. *Al-Qlisth Law Review*, 6(1), 1–21.

- Mendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI -Press).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Terjemahan* (U. P. Rohidi, Tjetjep Rohindi (ed.); Edition3). Sage Publications.
- Mthethwa, R. M. (2012). *Critical Dimensions for Policy Implementation*. *African Journal of Public Affairs*, 5(2), 36-42
- Miznawati, M., & Zuraini, Z. (2003). *Dampak Implementasi Program Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Almuslim*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5 (5), 2702-2717
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Musthafa, I., & Meliani, F. (2021). *Penerapan Metode Pembelajaran Islam Klasik Al-Zarnuji di Era Revolusi Industri 4.0*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.*, 4 (7), 654–667.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.329>
- Nur, K. (2014). *Manajemen Strategi Pendidikan*. UIN Sunan Ampel Press.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Surakarta: Unisri Press 2020
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur*. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276–292.  
<https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2539>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 1–12.  
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rosyida, I., & Tommy, F. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan CSR*. 5(1).
- Rodiyah, R (2021). *Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdek (MBKM) di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional*. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No 2, pp. 425-434)

- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press 2019
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media
- Siswati, S. (2019). *Pengembangan Soft Skills Dalam Kurikulum Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 264. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v17i2.1240>
- Solichin, Abdul Wahab (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryani, L., Mbagho, H. M., & Mei, A. (2022). *Respon Mahasiswa Proram Studi Pendidikan Matematika Universitas Flores pada Program MBKM*. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(1), 812-823.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. In *penelitian dan metode* (p. 334). CV Alfabeta.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework*. Dalam *Jurnal Administration and Society*. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975.
- Wardani, B. G. P. (2022). *Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka dalam perspektif teori konstruktivisme di universitas muhammadiyah malang*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wijaya, H., Pae, K., & Jati, I.R.A. (2022). *Dampak implementasi merdeka belajar kampus merdeka (mbkm) pada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di universitas katolik widya mandala surabaya*. *Dampak Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Pada Dosen, Mahasiswa, Dan Tenaga Kependidikan Di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, 7(1), 74-98.
- Wulandari Dewi, Syamsul Arifin, Edy Cahyono, Sri Suning Kusumawardani, Gatot F Hertono, Sri Peni Wastutiningsih, Hendrawan Soetanto, I Made Supartha Utama, Nur Masyitah Syam, Pradipta Hendrawan Putra, Helsa Jumaipa WY, Cicilia Wijayanti, J. (2021). *Program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka*.
- Peraturan Menteri (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan*

*Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta*

*Peraturan Pemerintah (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta*





# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail :lp3muunismuh@plasa.com

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 105/05/A.6-VIII/VII/1444/2023 26 Shafar 1444 H  
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal 11 September 2023M  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
di –  
Unismuh Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Semoga Allah Swt senantiasa Melimpahkan rahmatdan karunia Nya kepada kita sekalian insya Allah.  
Kami dari Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerangkan bahwa :

Nama : Heris  
Jurusan : Magister Administrasi Publik  
NIM : 105031106720

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan penelitian dengan judul :

“ Kimplementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar“

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,  
  
  
**Dr. Muhsin S.Pd., M.Pd**  
NIP. 1127761

Tembusan yth;  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail:lp3@unismuh.ac.id

Nomor : 105/05/A.6-VIII/VII/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Shafar 1444 H  
11 September 2023M

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Pertanian  
di -  
Unismuh Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semoga Allah Swt senantiasa Melimpahkan rahmatdan karunia Nya kepada kita sekalian insya Allah.

Kami dari Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerangkan bahwa :

Nama : Heris  
Jurusan : Magister Administrasi Publik  
NIM : 105031106720

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan penelitian dengan judul :

**“ Kimplementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar“**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Tembusan yth;  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Arsip

## Lampiran 2 Hasil Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin, No. 259, Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Heris  
Nim : 105031104420  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

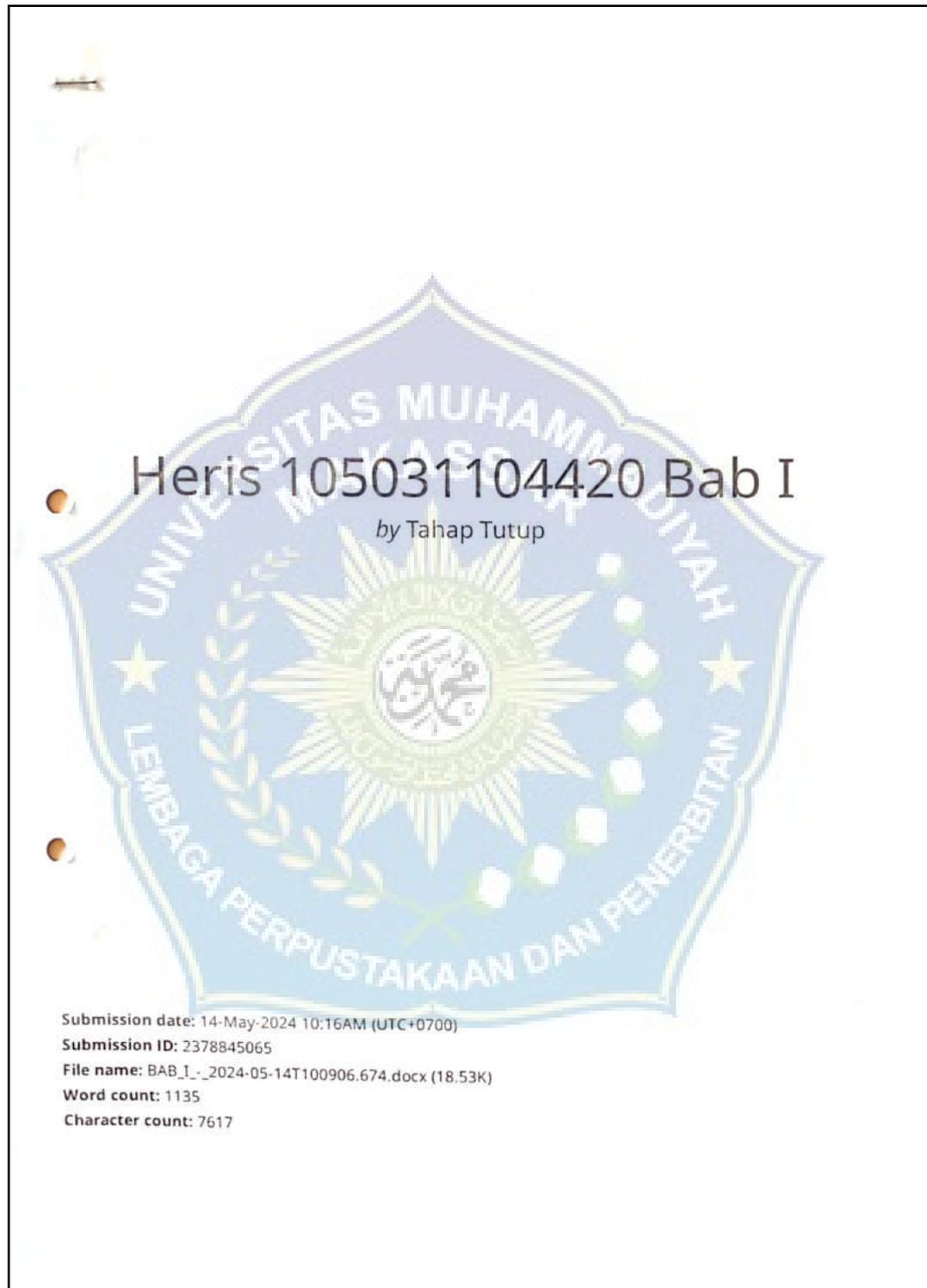
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Nur Hafid, M.L.P.  
1974-06-09

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

**Lampiran 3 Hasil Turnitin**

Heris 105031104420 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Abdul Kholik, Hasan Bisri, Zahra Khusnul Lathifah, Berliana Kartakusumah, Mustholah Maufur, Teguh Prasetyo. "Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa", Jurnal Basicedu, 2022 Publication	1%
5	Aswar Annas, Humaidid Muhajir. "Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar", Journal of Government and Politics (JGOP), 2022 Publication	1%

6 [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net) 1 %  
Internet Source

7 Sofia Sao, Lely Suryani, Hilaria Melania Mbagho, Agustina Mei. "Respon Mahasiswa Proram Studi Pendidikan Matematika Universitas Flores pada Program MBKM", Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 2022 1 %  
Publication

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



# Heris 105031104420 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 10:17AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2378845529  
File name: BAB\_II\_-\_2024-05-14T100908.243.docx (43.34K)  
Word count: 2608  
Character count: 17875



# Heris 105031104420 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 10:17AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2378845922  
File name: BAB\_III\_-\_2024-05-14T100908.243.docx (17.55K)  
Word count: 512  
Character count: 3179



# Heris 105031104420 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 10:18AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2378846562  
File name: BAB\_IV\_-\_2024-05-14T100908.244.docx (535.98K)  
Word count: 8498  
Character count: 54551

eris 105031104420 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

10%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



# Heris 105031104420 Bab V

by Tahap Tutup



**Submission date:** 14-May-2024 10:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2378847019

**File name:** BAB\_V\_-\_2024-05-14T100908.226.docx (16.01K)

**Word count:** 619

**Character count:** 3916

Heris 105031104420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%  
INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id  
Internet Source

2%

2

mafiadoc.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

1%



## Lampiran 4 Instrumen Wawancara

### Lembar Validasi Instrumen 1 (Pedoman Wawancara)

#### A. Identitas Validator

Nama : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (Dosen Pembimbing I)  
 Bidang Keahlian : Kebijakan Publik  
 Email : nuryantimustari@unismuh.ac.id  
 No. HP : 082194131980

#### B. Petunjuk Pengisian Validasi

Lembar Penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar" Dengan petunjuk penilaian sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda checklist (✓) pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria :

Sangat sesuai : 4  
 Sesuai : 3  
 Tidak sesuai : 2  
 Sangat Tidak sesuai : 1

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada kolom yang telah disediakan

#### C. Validasi Instrumen

No	Indikator	Jawaban				Saran/Masukan
		1	2	3	4	
SUB INDIKATOR 1Isi Kebijakan						
1	Bagaimanagambaranumum tentang Kebijakan Program Merdeka Belajar di Kampus Unismuh Makassar ?			✓		
2	Sejak kapan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tersebut diterapkan di Kampus Unismuh Makassar ?			✓		
3	Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar ?			✓		
4	Seperti apa bentuk pelaksanaan Kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?	✓				
5	Bagaimana penerapan kebijakan					

	MBKM di setiap Fakultas, apakah ada perbedaan pelaksanaannya atau sama saja ?	✓			
SUB INDIKATOR 2 Tingkat Informasi Aktor-aktor yang Terlibat					
1	Siapa aktor-aktor utama yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di kampus Unismuh Makassar ?		✓		
2	Siapakah yang pertama menyampaikan informasi terkait program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
3	Bagaimana tingkat ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian MBKM di Unismuh Makassar ?		✓		
4	Bagimanakah akses keterbukaan data dan informasi di ketahui melalui aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
5	Mengapa aktor yang terlibat sangat penting untuk memahami proses MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
SUB INDIKATOR 3 Dukungan bagi kebijakan					
1	Bagaimanabentuk dukungan pihak pimpinan kampus dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
2	Siapa yang pertama mendukung kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
3	Bagaimanacara mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
4	Apakah ada kendala yang di hadapi selama pelaksanaan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
5	Apa yang terjadi jika kurang mendapat dukungan dari pimpinan kampus dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		

SUB INDIKATOR 4 Pembagian Potensi				
1	Bagaimana peran aktor menyeimbangkan kebijakan program MBKM di setiap fakultas di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
2	Bagaimana menyusun wewenang pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
3	Bagaimana mengatur kegiatan pelaksanaan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
4	Apa saja bentuk tanggungjawab masing-masing prodi dalam penerapan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
5	Bagaimana koordinasi antar fakultas melihat potensi kebijakan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	

Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu):

1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

\*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, 26 Juni 2023

Validator



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

### Lembar Validasi Instrumen II (Pedoman Observasi)

#### A. Identitas Validator

Nama : Dr. Nuryanti Mustari,S.IP.,M.Si  
 Bidang Keahlian : Kebijakan Publik  
 Email : nuryantimustari@unismuh.ac.id  
 No. HP : 082194131980

#### B. Petunjuk Pengisian Validasi

Lembar Penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar". Dengan petunjuk penilaian sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria :

Sangat sesuai : 4  
 Sesuai : 3  
 Tidak sesuai : 2  
 Sangat Tidak sesuai : 1

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada kolom yang telah disediakan

#### C. Validasi Instrumen

No	Indikator	Jawaban				Saran/Masukan
		1	2	3	4	
<b>SUB INDIKATOR 1</b> Isi Kebijakan						
1	Gambaran kebijakan MBKM				√	
2	Waktu di terapkan				√	
3	Aktor yang terlibat				√	
4	Bentuk pelaksanaan				√	
5	Penerapan kebijakan				√	
<b>SUB INDIKATOR 2</b> Tingkat Informasi Aktor-aktor yang Terlibat						
1	Aktor-aktor utama				√	
2	Penyampaian informasi				√	
3	Ukuran dan tujuan				√	
4	Keterbukaan data dan informasi				√	
5	Penting ntuk memahami proses merdeka belajar					

SUB INDIKATOR 3 Dukungan bagi Kebijakan					
1	Bentuk dukungan pimpinan		✓		
2	Mendukung kebijakan			✓	
3	Mengukur tingkat keberhasilan			✓	
4	Kendala dukungan kebijakan			✓	
5	Kurang mendapat dukungan			✓	
SUB INDIKATOR 4 Pembagian Potensi					
1	Peran aktor				✓
2	Menyusun wewenang pembagian tugas				✓
3	Mengatur kegiatan pelaksanaan			✓	
4	Bentuk tanggungjawab			✓	
5	Koordinasi antar fakultas	✓			

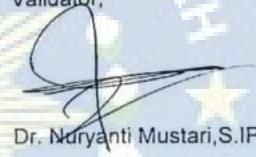
Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu):

1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

\*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, 26 Juni 2023

Validator,



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si



### Lembar Validasi Instrumen 1 (Pedoman Wawancara)

#### A. Identitas Validator

Nama : Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Dosen Pembimbing II)  
 Bidang Keahlian : Pemberdayaan Masyarakat  
 Email : lukman.hakim@unismuh.ac.id  
 No. HP : 0811414659

#### B. Petunjuk Pengisian Validasi

Lembar Penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar". Dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria :

Sangat sesuai : 4  
 Sesuai : 3  
 Tidak sesuai : 2  
 Sangat Tidak sesuai : 1

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada kolom yang telah disediakan

#### C. Validasi Instrumen

No	Indikator	Jawaban				Saran/Masukan
		1	2	3	4	
SUB INDIKATOR 1Isi Kebijakan						
1	Bagaimana gambaran umum tentang Kebijakan Program Merdeka Belajar di Kampus Unismuh Makassar ?			√		
2	Sejak kapan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tersebut diterapkan di Kampus Unismuh Makassar ?			√		
3	Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar ?			√		
4	Seperti apa bentuk pelaksanaan Kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			√		
5	Bagaimana penerapan kebijakan					

	MBKM di setiap Fakultas, apakah ada perbedaan pelaksanaannya atau sama saja ?				✓
<b>SUB INDIKATOR 2 Tingkat Informasi Aktor-aktor yang Terlibat</b>					
1	Siapa aktor-aktor utama yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di kampus Unismuh Makassar ?				
2	Siapakah yang pertama menyampaikan informasi terkait program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?	✓			
3	Bagaimana tingkat ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian MBKM di Unismuh Makassar ?		✓		
4	Bagimanakah akses keterbukaan data dan informasi di ketahui melalui aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓	
5	Mengapa aktor yang terlibat sangat penting untuk memahami proses MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?	✓			
<b>SUB INDIKATOR 3 Dukungan bagi kebijakan</b>					
1	Bagaimanabentuk dukungan pihak pimpinan kampus dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?	✓			
2	Siapa yang pertama mendukung kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓		
3	Bagaimanacara mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓	
4	Apakah ada kendala yang di hadapi selama pelaksanaan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓	
5	Apa yang terjadi jika kurang mendapat dukungan dari pimpinan kampus dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓	

SUB INDIKATOR 4 Pembagian Potensi				
1	Bagaimana peran aktor menyeimbangkan kebijakan program MBKM di setiap fakultas di Kampus Unismuh Makassar ?			✓
2	Bagaimana menyusun wewenang pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
3	Bagaimana mengatur kegiatan pelaksanaan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?		✓	
4	Apa saja bentuk tanggungjawab masing-masing prodi dalam penerapan MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓
5	Bagaimana koordinasi antar fakultas melihat potensi kebijakan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?			✓

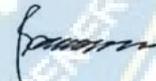
Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu):

1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

\*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, 26 Juni 2023

Validator,



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

### Lembar Validasi Instrumen II (Pedoman Observasi)

#### A. Identitas Validator

Nama : Dr. H. Lukman Hakim, M.Si  
 Bidang Keahlian : Pemberdayaan Masyarakat  
 Email : lukman.hakim@unismuh.ac.id  
 No. HP : 0811414659

#### B. Petunjuk Pengisian Validasi

Lembar Penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen validitas yang akan digunakan dalam menilai instrumen penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar". Dengan petunjuk penilaian sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan skor dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang telah disesuaikan dengan kriteria :

Sangat sesuai : 4  
 Sesuai : 3  
 Tidak sesuai : 2  
 Sangat Tidak sesuai : 1

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada kolom yang telah disediakan

#### C. Validasi Instrumen

No	Indikator	Jawaban				Saran/Masukan
		1	2	3	4	
<b>SUB INDIKATOR 1</b> Isi Kebijakan						
1	Gambaran kebijakan MBKM				✓	
2	Waktu di terapkan					
3	Aktor yang terlibat				✓	
4	Bentuk pelaksanaan				✓	
5	Penerapan kebijakan				✓	
<b>SUB INDIKATOR 2</b> Tingkat Informasi Aktor-aktor yang Terlibat						
1	Aktor-aktor utama				✓	
2	Penyampaian informasi				✓	
3	Ukuran dan tujuan				✓	
4	Keterbukaan data dan informasi				✓	
5	Penting ntuk memahami proses merdeka belajar					

SUB INDIKATOR 3 Dukungan bagi Kebijakan				
1	Bentuk dukungan pimpinan	✓	✓	
2	Mendukung kebijakan	✓		
3	Mengukur tingkat keberhasilan		✓	
4	Kendala dukungan kebijakan		✓	
5	Kurang mendapat dukungan			✓
SUB INDIKATOR 4 Pembagian Potensi				
1	Peran aktor			✓
2	Menyusun wewenang pembagian tugas			✓
3	Mengatur kegiatan pelaksanaan		✓	✓
4	Bentuk tanggungjawab		✓	
5	Koordinasi antar fakultas		✓	

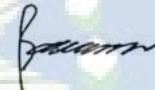
Kesimpulan instrumen ini dinyatakan (lingkari salah satu):

1. Layak digunakan tanpa revisi
- ② Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

\*) Validator internal adalah pembimbing tesis

Makassar, 26 Juni 2023

Validator,



Dr. Lukman Hakim, M.Si



## Lampiran 5 Matriks Wawancara

Matriks wawancara

Pelaksanaan						
No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Informan	Kesimpulan	Keterangan
1	Isi Kebijakan	1. Bagaimana gambaran umum tentang isi Kebijakan Program Merdeka Belajar di Kampus Unismuh Makassar ?	<p>Secara umum kebijakan MBKM dari Kemendikbud diterima dan disambut baik oleh pimpinan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, seperti mengenai konversi SKS</p> <p>Terkait adanya isi kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dari Kemendikbud mengenai konversi SKS diterima dengan baik di unismuh hal ini ditandai dengan program telah diikuti banyak mahasiswa dan sejak di luncurkan oleh pemerintah</p>	<p>Ketua LP2AI Unismuh Makassar</p> <p>Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Kebijakan yang dikemukakan oleh Kemendikbud mengenai konversi 20 SKS belum sepenuhnya dilakukan secara <b>full</b> sebanyak 20 SKS oleh pihak pelaksana MBKM di Unismuh Makassar hal ini karena mempertimbangkan lingkungan kebijakan eksternal yang dimana pencapaian hasil belajar mahasiswa harus maksimal yang dimana sebagian capaian belajarnya belum bisa terpenuhi melalui program</p>	

			<p>tahun 2020</p> <p>Terkait kebijakan MBKM dari Kemendikbud secara garis besar di sambut baik oleh semua pihak yang terlibat dalam program MBKM ini. Walaupun prodi belum bisa menerapkan secara penuh 20 SKS.</p> <p>Kebijakan mengenai program MBKM yang dilaksanakan oleh prodi saya sejauh ini terarah dengan jelas karena sudah ada buku pedoman dan buku saku sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBKM</p>	<p>Ketua Prodi Agribisnis</p> <p>Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah</p>		
--	--	--	---	--	--	--

		<p>Terkait kebijakan MBKM konversi nilai dan sks sejauh ini kegiatan MBKM pihak prodi benar-benar mencover nilai-nilai saya karena adanya kebijakan MBKM.</p> <p>Rektor sebagai pimpinan Kampus,LP2AI yang diberikan tugas untuk membuat pedoman kebijakan MBKM sebagai bahan</p> <p>Prodi sebagai pihaka pelaksana, dosen dan mahasiswa sebagai sasaran utama</p>	<p>Mahasiswa Agribisnis</p> <p>Ketua LP2AI</p>	<p>keterlibatan aktor</p>
	2. Siapa saja aktor			

		<p>yag terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di Unismuh Makassar ?</p>	<p>Kendalanya adalah masalah pencairan dananya mahasiswa yang lambat dan bahkan lama mengantri juga untuk menunggu dananya keluar dari kementerian</p> <p>Hal yang menjadi kendala soal dana yang terlambat cair, kemudian soal mengenai konversi nilai yang ada pada dosen yang kadang tidak paham dengan program ini</p>	<p>Ketua LP2AI</p>	<p>dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakn MBKM di Kampus Unismuh Makassar merupakan suatu kebijakan MBKM yang di terapkan dan diterima dengan baik oleh semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Walaupun ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan MBKM tersebut.</p> <p>Yang menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan MBKM yang terjadi di PRODI adalah masalah finansial yang kadang terlambat cair dari Kemendikbud</p>	
--	--	--	--	--------------------	--	--

2.	Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat	1. Siapa saja aktor-aktor utama yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di kampus Unismuh Makassar?	Rektor kemudian di sampaikan ke Lembaga LP2AI sebagai aktor utama dalam menangani program kegiatan pembelajaran MBKM dan	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariaah  Ketua LP2AI	Aktor-aktor kebijakan yang terlibat sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan pembelajaran	

		<p>kemudian di sampaikan ke Prodi sebagai penyedia fasilitas bagi mahasiswa, serta mekanisme pelaksanaannya pihak Prodi mendaftarkan ke akun Kampus merdeka</p> <p>Terkait mengenai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM tentunya pihak terkait seperti Rektor sebagai pemberi keputusan dan LP2AI sebagai pembuat pedoman pelaksanaan pelaksanaan MBKM serta kami mahasiswa sebagai sasaran utama dalam kegiatan MBKM</p> <p>Mekanisme pelaksanaannya pihak Prodi mendaftarkan ke</p>	<p>Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>MBKM. Aktor yang terlibat diperlukan langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik sehingga tidak terjadi komunikasi yang tidak jelas.</p> <p>Tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu informasi dibutuhkan yang jelas, baik secara tertulis Maupin lisan dan tak kalah penting bisa di akses di internet.</p> <p>Melalui bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM Perguruan Tinggi</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang di ajarkan kepada mahasiswa Unismuh Makassar?</p>	<p>akun Kampus merdeka. Sehingga keterbukaan informasi sangat terbuka karena bisa di akses secara online</p> <p>LP2AI yang akan menangani MBKM berupa kurikulum dan SOP dalam pelaksanaan MBKM. Untuk prodi menjadi pelaksana teknis kebijakan yang sudah di tentukan oleh pimpinan kampus</p> <p>LP2AI sebagai pembuat pedoman pelaksanaan MBKM serta kami mahasiswa sebagai sasaran utama dalam kegiatan MBKM</p>	<p>Ketua LP2AI Unismuh Makassar</p>	<p>diberikan kekuasaan dan otonomi untuk menciptakan proses pembelajaran fleksibel demi terciptanya pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai kebutuhan mahasiswa.</p>	
--	--	--	---	-------------------------------------	---	--

				Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah		
		3. Bagaimana akses keterbukaan data dan informasi tentang bentuk kegiatan pembelajaran di ketahui melalui	keterbukaan informasi sangat terbuka karena bisa di akses secara online	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah		
				Ketua LP2AI	Penyampain informasi dari aktor akan memudahkan mengetahui kebijakan program kegiatan pembelajaran	

		aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar?	Untuk prodi menjadi pelaksana teknis kebijakan yang sudah di tentukan oleh pimpinan kampus dan bisa di akses secara online terkait program MBKM.	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	MBKM yang ada.  Melalui bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM Perguruan Tinggi diberikan kekuasaan dan otonomi untuk menciptakan proses pembelajaran fleksibel demi terciptanya pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai kebutuhan mahasiswa dan informasi yang transparan.	
3	Dukungan Kebijakan	1. Bagaimana dukungan pihak pimpinan kampus dalam pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM di Kampus Unismuh Makassar ?	Pimpinan sangat mendukung dan mengapresiasi terkait adanya dukungan kebijakan program kegiatan pembelajaran MBKM di Kampus Unismuh Makassar karena tanpa dukungan dari	Ketua LP2AI	Terkait dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran program MBKM diperlukan sumber daya manusia khusus yang menangani program MBKM yang berhubungan	

			<p>pimpinan program tidak bisa terlaksana.</p> <p>Terkhusus kami dari pimpinan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan adanya kegiatan pembelajaran program MBKM kami sangat mendukung penuh, di tambah juga pimpinan ikut mendukung sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar</p> <p>Terkait dukungan kebijakan kegiatan pembelajaran di sistem, kita tahu sudah jelas karena ada pada Standar Operasional Prosesdur (SOP) sudah mengatur.</p> <p>Berbicara terkait dukungan</p>	<p>Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>dengan jumlah sumber daya manusia</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			<p>kebijakan kegiatan pembelajaran, prodi sudah cepat dan tanggap dalam mensupport karena melalui program ini sudah ada beberapa teman kami mengikuti program ini di luar kota</p>	<p>Ketua Prodi Agribisnis</p>		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--



Mahasiswa Agribisnis

		<p>2. Apa saja kendala yang di hadapi selama pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar dan apa saja bentuk kendalanya?</p>	<p>Kendala seperti pendanaan baik dari Kemendikbud maupu Kampus</p> <p>Untuk SDM Unismuh sendiri masih minim dananya</p>	<p>Mahasiswa Prodi Agribisnis</p> <p>Ketua LP2AI</p>	<p>dukungan kebijakan dari pimpinan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan program kegiatan pembelajaran MBKM walaupun ada kendala apapun yang dihadapi</p>	
		<p>3. Apa manfaat yang di rasakan pihak kampus, baik fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa terhadap adanya pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran</p>	<p>Karena melalui kegiatan pembelajaran ada beberapa mahasiswa yang keluar kota di kirim oleh kampus untuk mengikuti pembelajaran.</p>	<p>Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Dukungam kebijakan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Prodi dalam pelaksanaan program MBKM karena dapat berjalan dengan baik dan lancar program kebijakan tersebut</p>	

		<p>kewirausahaan MBKM di Kampus Unismuh Makassar?</p>	<p>Melalui program ini sudah ada beberapa teman kami mengikuti program ini di luar kota.</p> <p>Karena mahasiswa setelah mengikuti program ini, dapat pengalaman, pengetahuan dan wawasan belajar di luar Kampus dan bahkan ada mahasiswa cepat mendapat pekerjaan setelah selesai nanti karena sudah memiliki dasar</p> <p>Dirasakan manfaatnya, karena selain mempunyai pengalaman di luar kampus juga menambah wawasan dan pengetahuan yang sama sekali tidak</p>	<p>Mahasiswa Agribisnis</p> <p>Ketua LP2AI</p> <p>Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>bahkan begitu besar manfaatnya baik dari ilmu pengetahuan maupun praktek di lapangan serta skill dan kompetensi.</p>	
--	--	---	--	---	---	--

			<p>pernah di kami rasakan sebelumnya saat belajar di Kampus Unismuh.</p>			
4	Pembagian potensi	<p>1. Bagaimana peran aktor dalam pelaksanaan program MBKM dengan program kebijakan lainnya yang ada di setiap fakultas di Kampus Unismuh Makassar?</p>	<p>Kami selaku pimpinan prodi koordinasi langsung dan sosialisasi pada setiap pelaksanaan program MBKM pada stakeholder yang terlibat, hal ini bertujuan untuk</p>	<p>Ketua Prodi Agribisnis</p>	<p>Mengatakan bahwa peran aktor dalam memberikan informasi terkait program kegiatan pembelajaran MBKM mengundang kepada setiap fakultas dan prodi untuk di</p>	

		<p>menyebarkan informasi-informasi terkait pelaksanaan program MBKM sehingga disampaikan secara langsung agar ikut berpartisipasi.</p> <p>Kami dari LP2AI memberikan sosialisasi dengan mengundang pimpinan fakultas, prodi dan tim MBKM yang sudah ditentukan oleh Pihak Universitas dan adapun yang menjadi eksekusi atau yang melaksanakan MBKM yaitu dari LP2AI.</p> <p>Peran pimpinan memberikan informasi tentang sosialisasi terkait</p>	<p>Ketua LP2AI</p>	<p>sosialisasikan di mana pihak LP2AI sebagai tim yang akan menyampaikan penjelasan tata cara alur pelaksanaan MBKM.</p>	
--	--	---	--------------------	--	--

			<p>program MBKM merupakan bentuk tanggung jawab bersama guna untuk mendukung program kegiatan pembelajaran MBKM, sehingga di butuhkan koordinasi secara sistematis antar pimpinan mulai dari LP2AI, Fakultas, Prodi, dan mahasiswa.</p> <p>Kami di informasikan secara langsung oleh pimpinan prodi melalui pemberitahuan dengan lisan dan tulisan.</p> <p>Menyebarkan informasi-informasi terkait pelaksanaan program MBKM di setiap prodi dan</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi  
Syariah

			<p>stakeholder yang terlibat.</p> <p>Memberikan sosialisasi dengan mengundang pimpinan fakultas, prodi dan tim MBKM.</p> <p>Peran pimpinan memberikan informasi tentang sosialisasi terkait program MBKM</p> <p>Kami selaku pimpinan prodi koordinasi langsung dengan fakultas, prodi dan stakeholder yang terlibat langsung dalam MBKM.</p>	<p>Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>Ketua Prodi Agribisnis</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>2. Apa saja bentuk tanggungjawab LP2AI dalam penerapan MBKM di setiap Fakultas dan prodi yang ada di Kampus Unismuh Makassar?</p>	<p>Kami mengikuti sosialisasi terkait program MBKM yang di adakan langsung oleh, baik dari LP2AI, Fakultas, maupun Prodi melalui pertemuan dari berbagai pihak yang terlibat.</p>	<p>Ketua LP2AI</p> <p>Ketua Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>Ketua Prodi Agribisnis</p>	<p>LP2AI melakukan pelatihan atau bimbingan mengenai adaptasi kurikulum MBKM kepada Prodi, kemudian Prodi memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai mekanisme pelaksanaan program kegiatan pembelajaran MBKM dari Kemendikbud.</p> <p>Koordinasi dan kolaborasi secara langsung dilakukan</p>	
--	--	--	---	---	--	--

		<p>3. Bagaimana mengkoordinasikan antar pimpinan kampus kepada pimpinan Fakultas maupun Prodi dalam pelaksanaan program MBKM di Kampus Unismuh Makassar?</p>	<p>Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>secara struktur menyampaikan penjelasan tata cara alur pelaksanaan MBKM sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar</p>	
--	--	--	--	--	--



## RIWAYAT PENULIS



Heris adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir pada tanggal 25 Mei 1992 di kampung abbarangge, kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan (Alm.) Bapak Abd. Hafid dan Ibu Kanda. Riwayat pendidikan penulis yaitu penempuh pendidikan formal di SDN 145 Waepute (1999-2005), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Marioriwawo (2005-2008), dan MA Negeri 1 Soppeng (2008-2011). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dengan masuk di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis mengambil S-1 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2011-2015). Karena keinginan yang kuat dan tekad untuk melanjutkan lagi pendidikan, maka penulis kembali melanjutkan pendidikan S-2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Admnistarsi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga penulis pun berhasil memperoleh gelar S-2 sebagai Magister Ilmu Admnistarsi Publik dan menyelesaikan tesis yang berjudul. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar". Semoga dengan adanya penulisan tesis ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi dunia pendidikan khususnya bagi Kampus Unismuh Makassar serta bermanfaat bagi mahasiswa, Dosen, dan Masyarakat luas.